



BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 dilakukan untuk menyusun prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2016 yang merupakan pelaksanaan dari RPJMD provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018. Pada bagian ini dianalisa seberapa besar tingkat capaian target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya, kendala-kendala yang dihadapi, serta prioritas dan sasaran pembangunan yang masih membutuhkan tindakan lebih lanjut. Dari hasil evaluasi, selanjutnya ditentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2016.

Evaluasi terhadap makro ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2014 menunjukan ekonomi Kalimantan Timur masih dipengaruhi perekonomian global, rendahnya pertumbuhan ekonomi Kaltim disebabkan oleh dua sektor paling berpengaruh dalam pembentukan PDRB provinsi Kalimantan Timur yakni sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan terutama subsektor industri pengolahan migas yang terus menurun.

Hal ini merupakan dampak dari perlambatan ekonomi Tiongkok yang menyebabkan permintaan batubara dari Kaltim juga mengalami penurunan. Selain itu pertambangan migas juga mengalami penurunan *lifting* pada empat tahun terakhir. Hal ini akan terjadi dalam dua tahun kedepan dimana pergerakan laju perekonomian Kaltim akan banyak dipengaruhi oleh konstelasi perekonomian global. Namun demikian perekonomian Kalimantan Timur tetap menjanjikan bagi investasi, pada tahun 2014 rasio investasi Kaltim mencapai 40 persen menempati urutan ke 4 nasional yang menunjukan daya saing Kalimantan Timur cukup baik. Hasil studi yang dilakukan ASEAN Competitiveness Institut Nasional University of Singapore, menempatkan Kaltim pada peringkat 3 daya saing Nasional setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Strategi Kalimantan Timur untuk melakukan tranformasi ekonomi dengan merubah struktur ekonomi berbasiskan sumber daya alam terbarukan menjadi perhatian penting dalam evaluasi ini, peran penting Pulau Kalimantan terhadap perekonomian Indonesia sebesar 8,7 persen dimana sebesar 58 persennya kontribusi Kalimantan Timur. Oleh



karenanya, naik turunnya perekonomian Kaltim sangat berpengaruh terhadap *share* Kalimantan terhadap Indonesia. Percepatan pengembangan industri hilir untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah perlu untuk tetap menjadi fokus utama di tahun 2016 dengan dukungan percepatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan SDM yang terampil.

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah karena letak geografisnya di wilayah tropis. Begitu pula Provinsi Kalimantan Timur, provinsi yang terletak di perbatasan wilayah tengah dan timur Indonesia ini memiliki beranekaragam sumber daya hayati yang tumbuh dalam bentangan alam yang luas. Selain itu, wilayahnya yang berbatasan darat dengan Negara Malaysia menjadi ciri khas tersendiri bagi Provinsi Kalimantan Timur dalam mengelola administrasi kewilayahan maupun kependudukannya.

Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan negara lain, Provinsi Kalimantan Timur memiliki nilai lebih dari segi geografis dibandingkan dengan provinsi lain termasuk perhatian dari pemerintah pusat. Selain itu, letak geografis Provinsi Kalimantan Timur berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dari Laut Sulawesi ke Samudra Hindia melalui Selat Makasar dan Selat Lombok yang memiliki potensi strategis sebagai pendukung perekonomian wilayah. Hal tersebut dikarenakan ALKI berperan dalam memperlancar transportasi kapal-kapal dagang (baik dalam maupun luar negeri) yang melintasi wilayah kepulauan Indonesia.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah sebesar 6,66 persen dari luas wilayah Indonesia sehingga termasuk dalam 3 besar provinsi terluas di Indonesia. Luas wilayah yang mencapai 16.732.065 Ha yang terdiri dari daratan seluas 12.638.892,63 Ha, perairan darat seluas 95.799,12 Ha, dan pengelolaan laut seluas 3.997.373 Ha menjadikan Provinsi Kalimantan Timur lebih memiliki peluang untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya. Sedangkan dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten yaitu Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu serta memiliki 3 (tiga) kota yaitu Balikpapan, Bontang, dan Samarinda.

Adapun pembagian wilayah administratif pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur menurut kabupaten/kota seperti tabel 2.1.



Tabel 2.1
Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Darat (Ha)	Luas Pengelolaan Laut (Ha)	Luas Perairan Darat	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1. Paser	1.103.079,03	8.200,00	6.617,10	1.117.896	10	144
2. Kutai Barat	1.349.555,59	-	21.436,55	1.370.992	16	237
3. Mahakam Hulu	1.938.738,41	-	6.202,38	1.944.941	5	50
4. Kutai Kartanegara	2.559.004,99	1.891,00	39.803,16	2.600.699	18	198
5. Kutai Timur	3.096.435,18	2.641,00	8.735,68	3.107.812	18	135
6. Berau	2.163.497,46	11.962,00	10.021,69	2.185.481	13	110
7. Penajam Paser Utara	291.894,83	400,00	478,40	292.773	4	54
8. Balikpapan	51.124,20	287,00	100,32	51.512	6	34
9. Samarinda	69.264,16	-	2.388,38	71.653	10	53
10. Bontang	16.298,78	275,00	15,45	16.589	3	15
0 – 4 Mil Laut (Kab/Kota)	-	25.656,00	-	-	-	-
4 - 12 Mil Laut (Kewenangan Provinsi)	-	3.971.717	-	-	-	-
Luas Provinsi Kalimantan Timur	12.638.892,63	3.997.373	95.799,12	16.732.065	103	1.026

Sumber: Hasil Pengolahan Tim RTRW GIS Prov. Kalimantan Timur

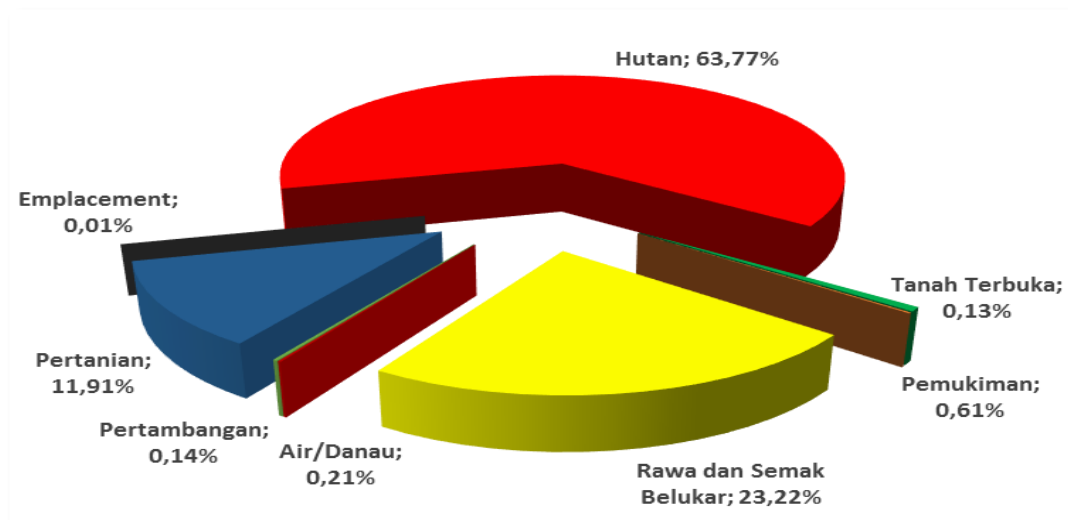
Posisi Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 2° 34'00" Lintang Utara (LU) dan 2°41'00" Lintang Selatan (LS), 113° 39'00" Bujur Timur (BT) dan 119° 39'00" Bujur Timur (BT). Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Negara Bagian Serawak Malaysia, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan; dan
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi.

Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh lahan hutan dengan luas total 7.998.124,04 Ha atau seluas 63,76 persen dari luas total luas daratan Kalimantan Timur. Lahan hutan yang dimaksud terdiri dari hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan tanaman, hutan mangrove primer, dan hutan mangrove sekunder. Sedangkan luas lahan pertanian mencapai 11,91

persen yang terdiri dari pertanian, perkebunan, perikanan darat, maupun lahan sawah. Selain itu, pemukiman penduduk hanya menempati wilayah Kalimantan Timur sebesar 0,61 persen dan pertambangan sebagai salah satu kontribusi terbesar perekonomian Kalimantan Timur hanya menggunakan lahan sebesar 0,14 persen seperti pada gambar 2.1.

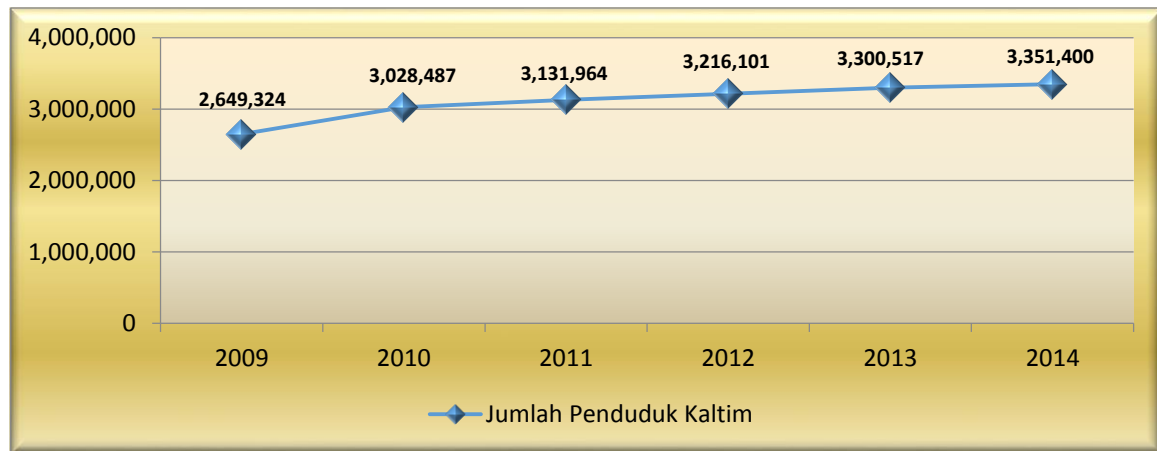
Gambar 2. 1
Persentase Luas Tutupan Lahan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014



Sumber : Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Penduduk Kalimantan Timur terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Penambahan penduduk ini terjadi karena dua faktor yakni pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi. Hal ini terlihat pada saat Sensus Penduduk tahun 2000 dimana jumlah penduduk Kalimantan Timur sejumlah 2.121.534 jiwa dan jumlah tersebut meningkat pesat 10 tahun kemudian menjadi 3.028.487 jiwa pada saat pelaksanaan Sensus Penduduk 2010 atau meningkat sebanyak 42,75 persen. Terakhir, pada tahun 2013 dan 2014 jumlah penduduk di Kalimantan Timur masing-masing sebesar 3.300.517 jiwa dan 3.351.400 jiwa. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk pada tahun 2013 sebesar 2,62 persen dan tahun 2014 sebesar 2,57 persen seperti pada gambar 2.2.

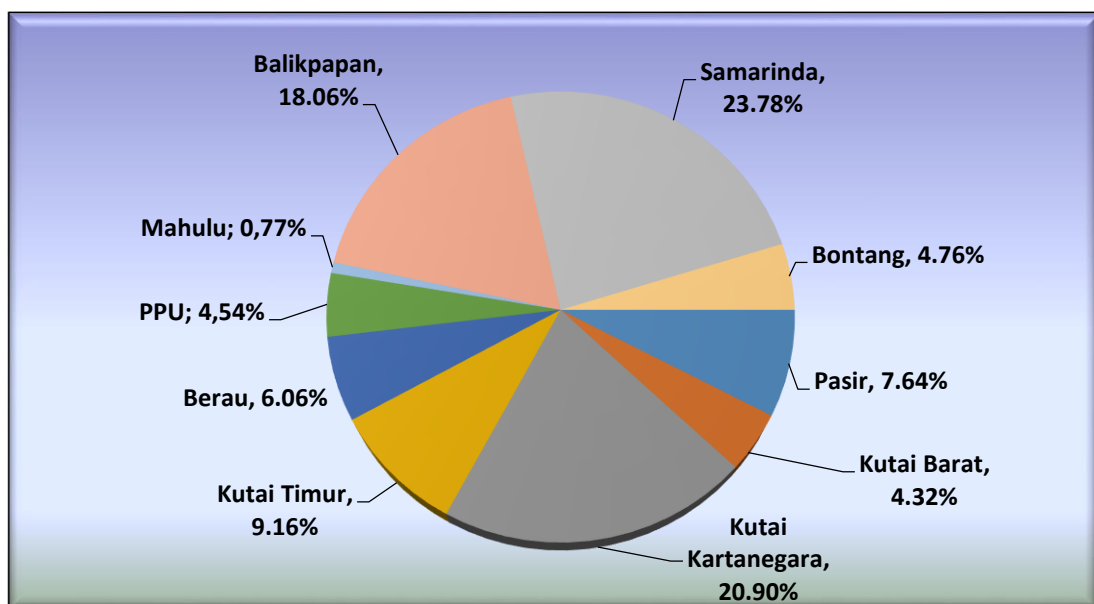
Gambar 2. 2
Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2014 (jiwa)



Sumber : BPS Prov. Kaltim Tahun 2014

Persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Timur tidak merata sehingga terjadi ketimpangan baik jumlah penduduk maupun kepadatan penduduk antar kabupaten/kota. Ketimpangan sangat terlihat pada wilayah perkotaan yang secara total hanya memiliki luas wilayah 1,09 persen namun dihuni oleh 46,60 persen penduduk, sedangkan 53,40 persen penduduk mendiami 98,91 persen luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang dapat dilihat pada gambar 2.3.

Gambar 2. 3
Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota (persen)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014



Sumber : BPS Prov. Kaltim Tahun 2014, diolah



Penduduk Provinsi Kalimantan Timur paling banyak berdomisili di Kota Samarinda yaitu sebesar 23,78 persen karena Kota Samarinda menjadi pusat pemerintahan sekaligus jasa perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur, diikuti Kabupaten Kutai Kartanegara dengan persentase penduduk sebesar 20,90 persen dan Kota Balikpapan sebesar 18,06 persen). Sedangkan jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang kurang dari 5 persen terdapat di Kota Bontang (4,76 persen), Kabupaten Penajam Paser Utara (4,54 persen) dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kabupaten Mahakam Hulu tidak mencapai 1 persen (0,77 persen).

Pada indikator kependudukan yang lain, kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 yang hanya sebesar 26,3 jiwa/km² mengindikasikan bahwa luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur tidak sebanding dengan penduduk yang tinggal di dalamnya. Dengan tingkat kepadatan seperti itu, dapat dikatakan bahwa setiap 1 km² wilayah provinsi Kalimantan Timur hanya didiami rata-rata oleh 26 penduduk. Tingkat kepadatan penduduk Kaltim ini hanya bertambah 1 – 2 orang per km² selama empat tahun terakhir.

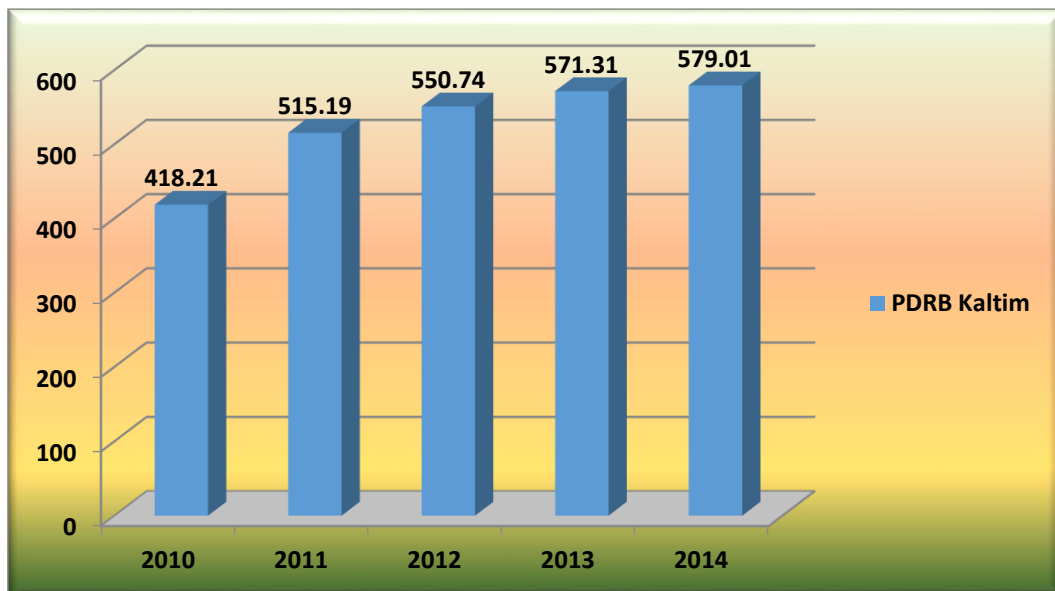
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1) Produk Domestik Regional Bruto

PDRB Provinsi Kalimantan Timur (termasuk Kaltara) mengalami peningkatan yang cukup signifikan setelah dalam penghitungan menggunakan tahun dasar 2010 dan diimplementasikannya *System of National Account* (SNA) 2008 oleh BPS. Perubahan metodologi dan cakupan tersebut membuat PDRB Kaltim melonjak sekitar 29 persen lebih. Angka yang baru menunjukkan PDRB Kaltim pada tahun 2014 mencapai Rp 579,01 triliun, bertambah Rp. 8,7 triliun dibandingkan dengan tahun 2013. Setiap tahun PDRB Kaltim mengalami kenaikan yang signifikan. Nilai PDRB tahun terakhir ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 418,21 triliun rupiah sehingga peningkatan yang signifikan ini menjadi pemicu peningkatan perekonomian daerah seperti pada gambar 2.4.

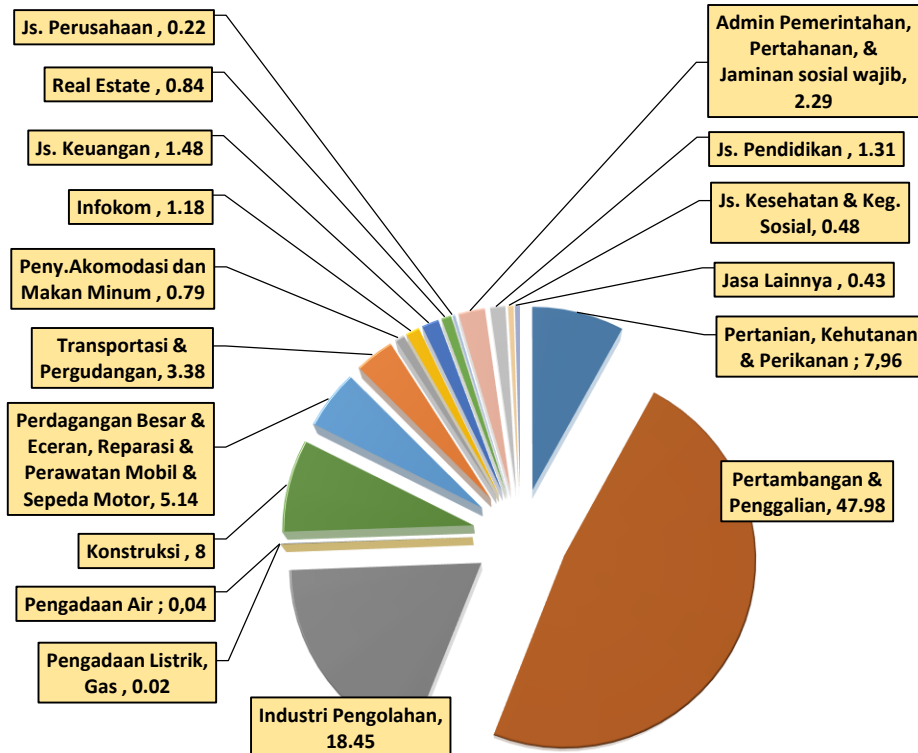
Gambar 2.4
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Prov. Kaltim, Tahun Dasar 2010 (Data termasuk Kaltara)

Pembentukan nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014 masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalan meskipun mengalami sedikit penurunan dari *tahun* sebelumnya menjadi 47,98 persen terhadap PDRB total. Sedangkan kontribusi sektor industri pengolahan mengalami peningkatan yakni menjadi 18,45 persen jika dibandingkan dengan Tahun 2013. Untuk kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menjadi perhatian khusus pemerintah provinsi maupun nasional, pada Tahun 2014 mencapai 7,96 persen seperti yang terlihat pada gambar 2.5.

Gambar 2.5
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas
Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun Dasar 2010

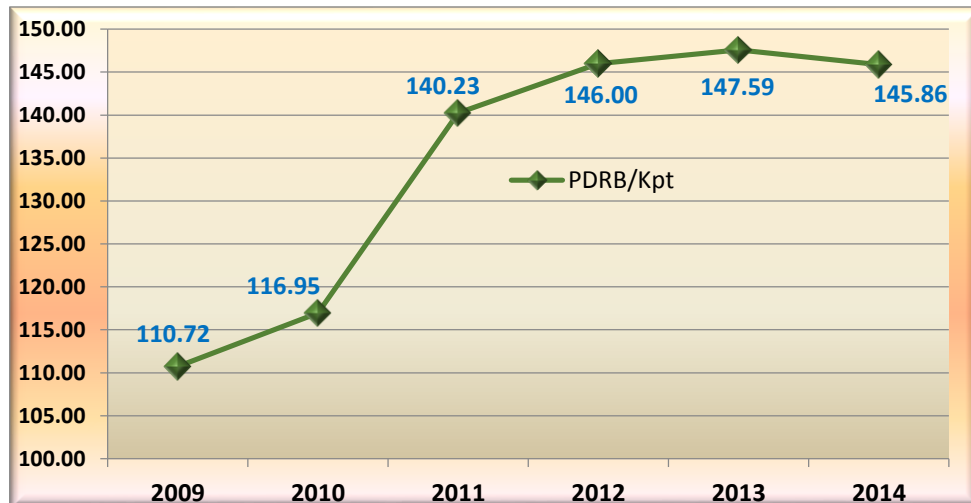
*Data Prov. Kalimantan Timur (termasuk Kaltara)

Dalam perkembangan perekonomian selanjutnya, pembangunan kedepan diharapkan Provinsi Kalimantan Timur mulai mengembangkan sektor-sektor yang berfokus pada peningkatan nilai tambah dari sumber daya alam terbarukan mengingat sektor pertambangan dan *penggalian* semakin menurun produksinyadan cenderung kurang sejalan dengan kelestarian lingkungan dan sosial.

Disamping itu *besarnya* PDRB Kalimantan Timur dapat menggambarkan positifnya kondisi perekonomian Kalimantan Timur secara umum, namun belum dapat memberikan informasi tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dianalisa melalui pendapatan per kapita dengan rumusan total pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Ukuran ini memiliki kelemahan karena rumusan yang membagi rata PDRB tanpa melihat kesenjangan, namun dengan mengetahui pendapatan per kapita dan PDRB per kapita, pemerintah dapat mengetahui gambaran awal perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro yang terlihat pada gambar 2.6 dan gambar 2.7.



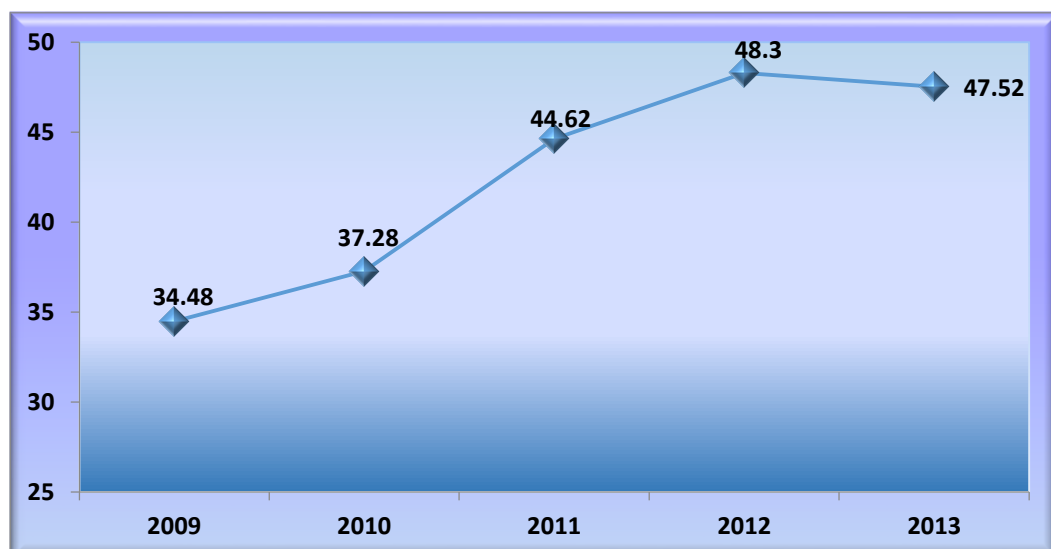
Gambar 2.6
PDRB per Kapita Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2014*



Sumber: BPS Prov. Kaltim, 2014

Keterangan : *)PDRB Tahun Dasar 2010 (Data termasuk Kaltara)

Gambar 2.7
Pendapatan Per Kapita Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 (Rp. Juta)



Sumber: BPS Prov. Kaltim, 2014

Keterangan : *)PDRB Tahun Dasar 2000 (Data Tidak Termasuk Kaltara)

Kenaikan pendapatan per Kapita secara bertahap terus terjadi mulai dari tahun 2009 hingga 2012. Dimulai dari Rp 34,48 juta pada tahun 2009 hingga menjadi Rp 47,52 juta. Selama kurun waktu itu, pendapatan per kapita penduduk



Kaltim meningkat 34,44 persen atau 8,6 persen per tahunnya. Pada tahun 2013, pendapatan perkapita penduduk Kaltim sedikit mengalami penurunan karena faktor melemahnya sektor pertambangan batubara maupun migas.

Selama kurun waktu 2009 – 2014, nilai PDRB per kapita Kaltim selalu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan per kapitanya. Secara rata-rata perbedaannya cukup signifikan, lebih dari 45 persen. Kondisi ini menjadi indikasi bahwa PDRB yang dihasilkan di Kaltim, lebih dari 45 persennya dinikmati oleh orang luar Kaltim, sedangkan rakyat Kaltim sendiri hanya menikmati 55 persen. Hal ini merupakan konsekwensi ketika perekonomian Kaltim umumnya dikuasai oleh investor dari luar Kaltim.

Tabel 2.2

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Lapangan Usaha
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2014**

No	Sektor	Laju Pertumbuhan (persen)		
		2012	2013	2014
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,43	5,66	5,09
2	Pertambangan dan Penggalian	8,04	2,27	(0,11)
3	Industri Pengolahan	(3,13)	(1,18)	0,49
4	Pengadaan Listrik, Gas	12,14	3,68	16,02
5	Pengadaan air	2,83	6,10	4,75
6	Konstruksi	6,40	5,13	6,48
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	5,78	3,42	4,33
8	Transportasi dan Pergudangan	7,59	7,88	8,40
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	9,45	3,54	4,92
10	Informasi dan Komunikasi	12,03	9,42	9,62
11	Jasa Keuangan	12,26	13,67	2,76
12	Real Estate	8,15	8,63	7,94
13	Jasa Perusahaan	8,55	7,71	10,12
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,64	3,68	10,36
15	Jasa Pendidikan	19,23	18,51	14,77
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,66	5,38	9,59
17	Jasa lainnya	3,75	2,73	6,79
Kalimantan Timur		5,48	2,72	2,02

Sumber: BPS Prov. Kaltim Tahun Dasar 2010 (Data termasuk Kaltara)

Dari Tabel 2.2 terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan. Hal ini dipicu dengan terjadinya

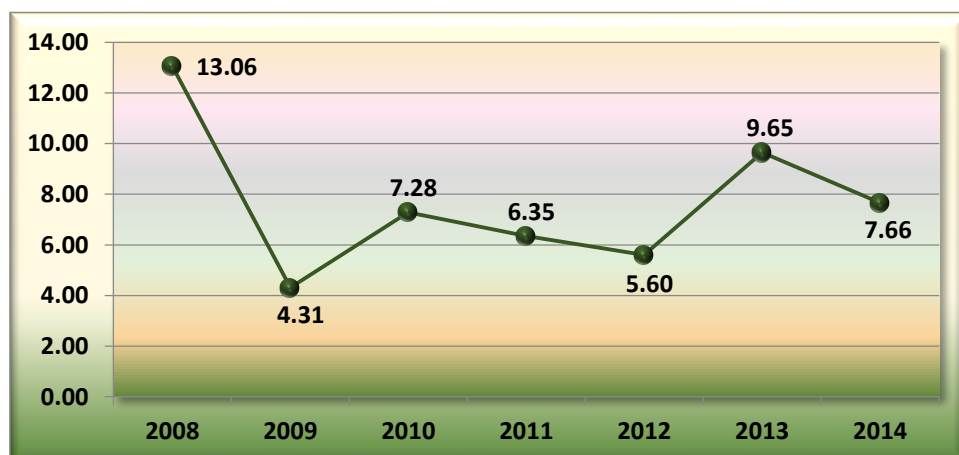
perlambatan pertumbuhan ekonomi pada sektor pertambangan dan penggalian yang disebabkan terus melemahnya pertambangan migas maupun batubara. Kontribusi negatif pada industri migas juga cukup berperan dalam menghambat gerak pertumbuhan ekonomi Kaltim.

2) Laju Inflasi

Terjadinya gejolak harga dapat mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat. Imbasnya dapat memunculkan masalah sosial-ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran dan juga kriminalitas. Oleh karena itu, pemerintah harus merumuskan kebijakan pengendalian harga-harga kebutuhan pokok untuk meredam terjadinya gejolak harga tersebut. Untuk mengetahui seberapa tinggi fluktuasi harga pasar yang terjadi di suatu wilayah, pemerintah daerah dapat menggunakan angka laju inflasi sebagai gambaran fluktuasi harga yang terjadi di tengah masyarakat dalam periode bulanan hingga tahunan.

Provinsi Kalimantan Timur melakukan penghitungan inflasi dibangun dari tiga kota IHK yakni Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kota Tarakan. Selama tahun 2010-2012, inflasi Kalimantan Timur cukup terkendali yang tergambarkan dari penurunan besaran inflasi selama periode tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa harga barang dan jasa di Kalimantan Timur relatif terkendali. Namun pada tahun 2013, terjadi lonjakan inflasi yang cukup signifikan, hampir mencapai dua digit yaitu 9,65 persen, lebih besar dari inflasi nasional yang mencapai 8,38 persen. Tahun berikutnya, inflasi Kaltim relatif lebih terkendali dengan besaran inflasi 7,66 persen, lebih rendah dari inflasi nasional yang mencapai 8,36 persen seperti gambar 2.8.

Gambar 2.8.
Nilai Inflasi Tahun Per Tahun Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2014
(Termasuk Kota Tarakan)



Sumber: BPS Prov. Kaltim, 2014

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama dari pembangunan daerah dengan berfokus pada pembangunan sumber daya manusia yang merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan. Pendeskripsian dalam menganalisa pembangunan manusia dapat dilakukan dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena indeks tersebut terdiri dari komponen-komponen dasar kehidupan manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dalam melihat keberhasilan pembangunan manusia, perlu adanya pemotretan hasil pembangunan manusia yang sudah dilakukan guna evaluasi perbaikan ke depannya. Pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan manusia dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia seperti gambar 2.9.

Gambar 2.9
Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur 2013

*) Data 2008 – 2012 Prov. Kalimantan Timur termasuk Kaltara

Data 2013 provinsi Kaltim tidak termasuk Kaltara.

Indeks pembangunan manusia dihitung untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia dengan melakukan analisis perbandingan pencapaian pembangunan manusia antar wilayah. IPM sendiri dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu dimensi kesehatan yang diwakili Angka Harapan Hidup, dimensi pendidikan yang diwakili Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama



Sekolah serta dimensi hidup layak/ekonomi yang diwakili oleh indikator purchasing power parity (PPP) seperti tabel 2.3.

Tabel 2.3
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2008 – 2013

Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1. Paser	73,46	73,99	74,66	75,40	75,85	76,56
2. Kutai Barat + Mahakam Ulu	72,16	72,60	72,90	73,69	74,05	74,61
3. Kutai Kartanegara	72,03	72,50	72,89	73,51	74,24	74,80
4. Kutai Timur	70,84	71,23	72,05	72,88	73,75	74,23
5. Berau	72,75	73,22	73,84	74,63	75,05	75,83
6. PPU	72,69	73,11	73,59	74,03	74,35	74,82
7. Balikpapan	77,31	77,86	78,33	78,85	79,38	79,87
8. Samarinda	76,12	76,68	77,05	77,63	78,26	78,79
9. Bontang	76,08	76,52	76,88	77,52	77,85	78,40
Kalimantan Timur (dengan Kaltara, kecuali 2013)	74,52	75,11	75,56	76,22	76,71	77,33
Reduksi Shortfall	-	2,32	1,81	2,68	2,08	2,65

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur, 2014

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur selalu mengalami kenaikan. Pada Tahun 2008, IPM Provinsi Kalimantan Timur sudah termasuk kategori tinggi yang mencapai 74,52 dan sudah di atas rata-rata nasional bahkan peringkat 6 se-Indonesia. Di tahun-tahun berikutnya, IPM terus mengalami kenaikan hingga terakhir Tahun 2013 angka IPM Provinsi Kalimantan Timur mencapai 77,33 dan menduduki peringkat 4 level nasional. Peningkatan angka IPM yang konsisten di tiap tahunnya berbanding lurus dengan peningkatan masing-masing komponen penyusunnya yang akan terdeskripsikan di bagian berikutnya.

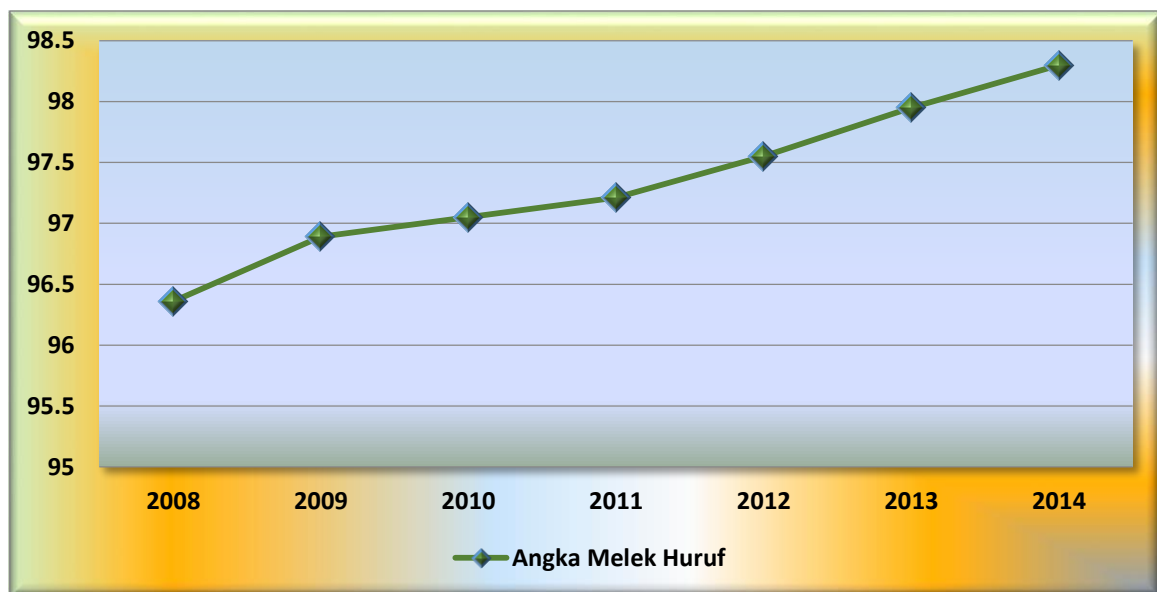
Selama kurun waktu 2008 – 2013, progress terbaik capaian pembangunan manusia di Kaltim terjadi pada tahun 2011 dan 2013. Hal ini ditandai dari besaran reduksi shortfall yang dicapai pada tahun tersebut masing-masing mencapai 2,68 dan 2,65. Dari sini dapat diartikan bahwa program-program pembangunan manusia di kedua tahun tersebut cukup berhasil mendorong peningkatan kualitas manusia di Kaltim. Meskipun demikian tidak menampik kemungkinan bahwa peningkatan kualitas manusia tersebut juga dipengaruhi oleh program pembangunan tahun-tahun sebelumnya.

2) Angka Melek Huruf dan Rata- rata Lama Sekolah

Pembangunan manusia merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) dan horisontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketerampilan, serta mampu mencukupi kebutuhan baik primer, sekunder, maupun tersier.

Beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan sosial adalah indikator di bidang pendidikan. Faktor pendidikan merupakan kunci peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berujung pada kesejahteraan masyarakat karena tingginya pendidikan masyarakat akan berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusia khususnya di Kalimantan Timur. Terkait dengan IPM, indikator makro yang digunakan dalam menentukan keberhasilan pendidikan adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah seperti gambar 2.10.

Gambar 2.10
Angka Melek Huruf
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2014 (%)



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur, 2014

*) Data Prov.Kaltim termasuk Kaltara

**) Data Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Timur Tahun 2014

Terlihat dengan jelas bahwa *progress* bidang pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Trend yang meningkat di tiap tahunnya mengindikasikan keberhasilan pemerintah dalam memberikan perhatian khusus di bidang pendidikan. Hal ini akan lebih maksimal jika selain dalam segi kuantitas pendidikan juga



diimbangi dari segi kualitas pendidikan sehingga output dari pendidikan bisa menjadi sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Pada tahun 2013, PPU menjadi satu-satunya kabupaten di Kaltim dengan angka melek huruf masih pada level 95 persen. Sementara kab/kota lain AMH nya sudah di atas 97 persen, bahkan Kutim dan Bontang AMH nya diatas 99 persen. Meskipun demikian, progress AMH semua kab/kota di Kaltim cukup baik dengan terus meningkatnya AMH setiap tahunnya seperti yang terlihat di tabel 2.4.

Tabel 2.4
Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 (%)

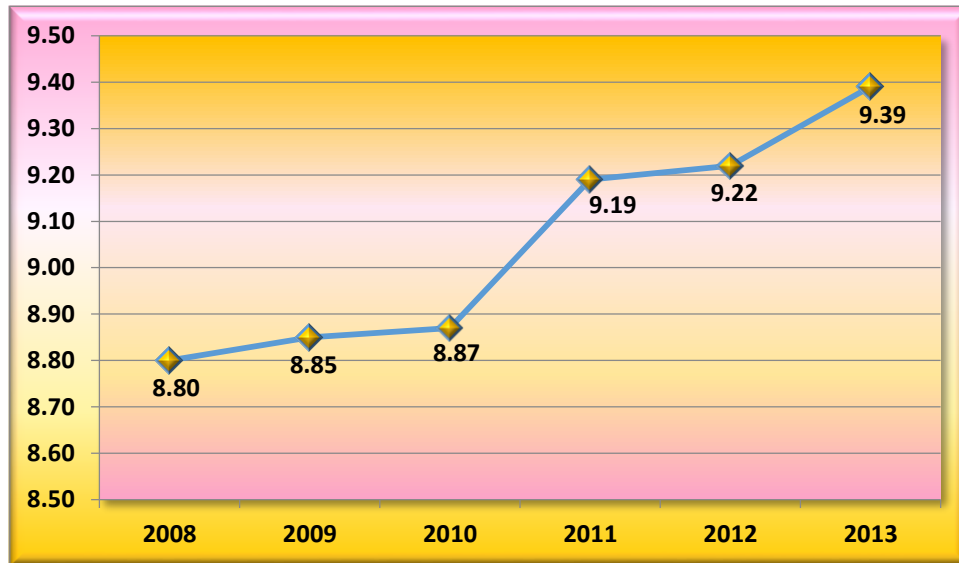
Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1. Paser	95,41	96,00	96,70	96,71	97,13
2. Kutai Barat + Mahakam Ulu	95,97	95,97	96,60	96,61	97,12
3. Kutai Kartanegara	96,87	96,87	97,31	98,33	98,34
4. Kutai Timur	95,89	97,28	98,25	99,29	99,32
5. Berau	96,30	97,18	97,20	97,26	97,85
6. PPU	94,93	95,55	95,57	95,77	95,81
7. Balikpapan	98,37	98,76	98,78	98,86	98,99
8. Samarinda	97,91	98,01	98,02	98,56	98,62
9. Bontang	99,08	99,20	99,21	99,22	99,25
Provinsi Kalimantan Timur (dengan Kaltara)	96,89	97,05	97,21	97,55	97,95

Sumber : BPS Prov. Kalimantan Timur Tahun 2014

Kualitas pendidikan penduduk Kaltim terus meningkat yang tergambar dari angka rata-rata lama sekolah. Pada tahun 2010, angka rata-rata lama sekolah penduduk Kaltim baru mencapai 8,87 tahun, akan tetapi tiga tahun berikutnya meningkat menjadi 9,39 tahun. Dengan kata lain bahwa rata-rata penduduk Kaltim usia 15 tahun ke atas sudah menamatkan SMP. PPU menjadi kabupaten dengan angka rata-rata lama sekolah terendah yaitu 7,82 tahun, sedangkan tertinggi dimiliki Balikpapan (10,49 tahun) seperti gambar 2.11 dan tabel 2.5.



Gambar 2.11
Rata-rata Lama Sekolah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013 (Tahun)



Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2013

*) Data Prov.Kaltim termasuk Kaltara

Tabel 2.5
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 –2013 (Tahun)

Kabupaten/Kota	T A H U N				
	2009	2010	2011	2012	2013
1. Paser	7,75	7,85	8,08	8,10	8,35
2. Kutai Barat + Mahakam Ulu	7,86	7,80	8,20	8,21	8,43
3. Kutai Kartanegara	8,38	8,33	8,70	8,76	8,89
4. Kutai Timur	7,65	7,86	8,08	8,47	8,63
5. Berau	8,03	8,13	8,58	8,62	8,82
6. PPU	7,58	7,66	7,68	7,71	7,82
7. Balikpapan	10,08	10,08	10,26	10,46	10,49
8. Samarinda	9,77	9,80	9,93	10,36	10,38
9. Bontang	10,07	10,04	10,11	10,40	10,45
Kalimantan Timur (dengan Kaltara)	8,85	8,87	9,19	9,22	9,39

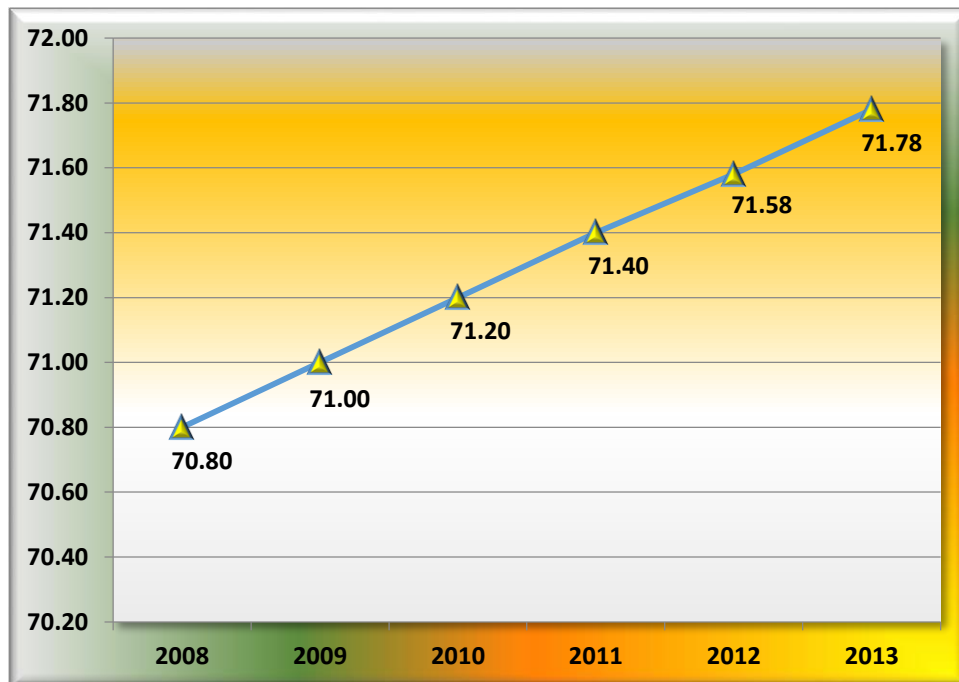
Sumber : BPS Prov. Kalimantan Timur, 2014



3) Angka Harapan Hidup

Salah satu komponen penting pembentuk IPM dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah Angka Harapan Hidup yang merupakan indikator di bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan peluang bayi baru lahir akan mencapai usia harapan hidup tertentu. Angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Timur setiap tahun semakin meningkat dimana pada tahun 2008, angka harapan hidup di Kalimantan Timur sebesar 70,80 tahun dan pada tahun 2013 meningkat hingga mencapai angka 71,78 tahun yang berarti bayi baru lahir pada tahun 2013 akan memiliki peluang hidup hingga usia 71-72 tahun seperti gambar 2.12 dan tabel 2.6.

Gambar 2.12
Angka Harapan Hidup
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013 (Tahun)



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur, 2014

*) Data Prov. Kaltim termasuk Kaltara



Tabel 2.6
Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 – 2013 (Tahun)

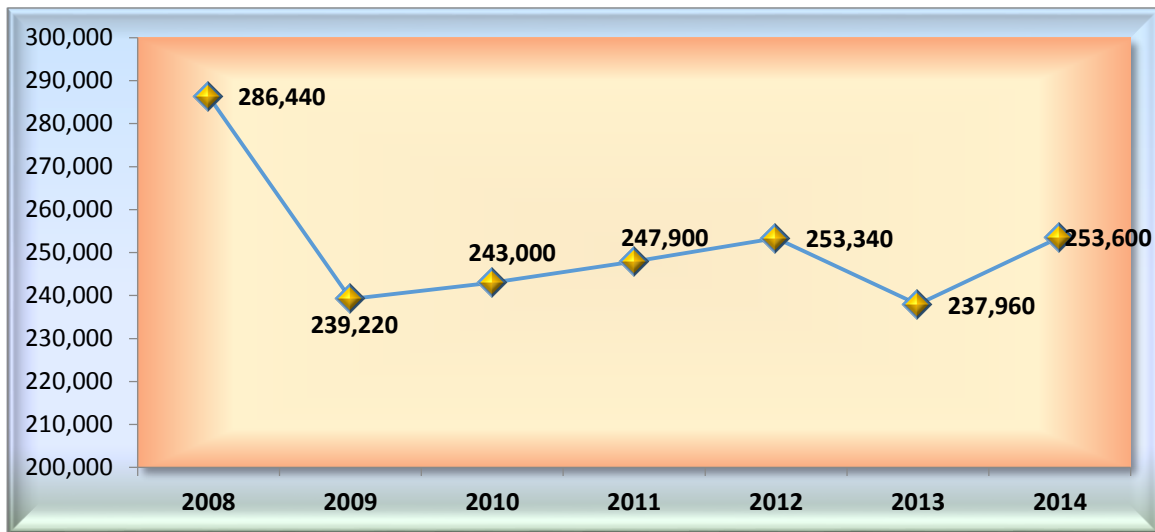
Kabupaten/Kota	T A H U N				
	2009	2010	2011	2012	2013
1. Paser	72,74	73,09	73,44	73,79	73,99
2. Kutai Barat	70,08	70,16	70,39	70,61	70,63
3. Mahakam Ulu					68,39
4. Kutai Kartanegara	67,85	67,93	68,05	68,17	69,17
5. Kutai Timur	68,43	68,61	68,82	69,03	70,73
6. Berau	69,66	69,92	70,18	70,43	71,94
7. Penajam Pasir Utara	71,32	71,46	71,63	71,80	73,99
8. Balikpapan	71,95	72,17	72,39	72,61	72,81
9. Samarinda	71,01	71,21	71,42	71,62	71,92
10. Bontang	72,26	72,42	72,60	72,78	73,12
Provinsi Kalimantan Timur (dengan Kaltara)	71,00	71,20	71,40	71,58	71,78

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur, 2014

4) Angka Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur cukup fluktuatif dari tahun ke tahun dimana pada tahun terakhir yakni 2014, jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 253.600 jiwa. Fluktuatifnya jumlah penduduk miskin selain disebabkan karena peningkatan garis kemiskinan sebagai batasan kategori miskin, juga karena banyaknya penduduk yang pengeluaran per kapitanya mendekati garis kemiskinan sehingga beberapa kondisi dalam kehidupan masyarakat dapat memberikan pengaruh pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Kondisi tersebut terutama difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat seperti inflasi, kenaikan harga BBM, hingga kebijakan-kebijakan mikro seperti program perlindungan social seperti gambar 2.13.

Gambar 2.13.
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2014

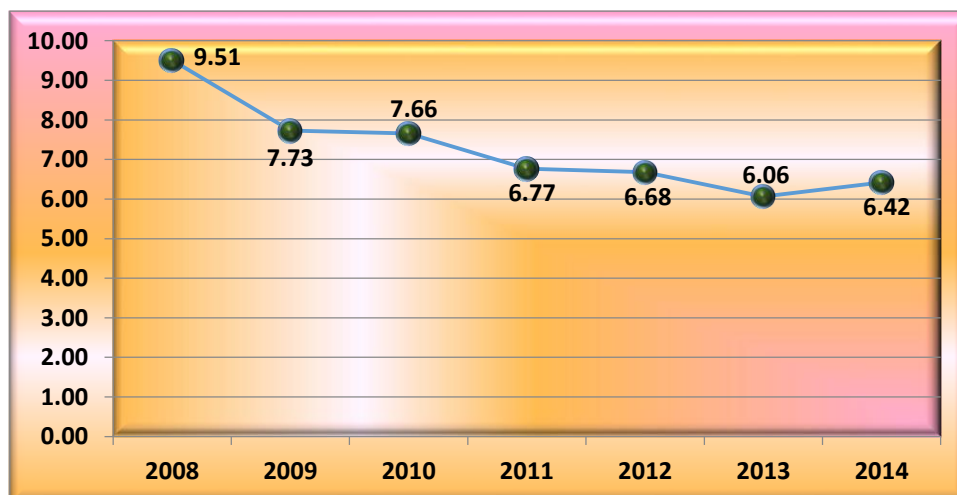


Sumber: BPS Prov.i Kalimantan Timur, 2014

*) Data Prov.Kaltim termasuk Kaltara (Kondisi Bulan Maret)

Jika dilihat dari angka kemiskinan, secara umum terjadi penurunan angka kemiskinan setiap tahunnya hingga pada tahun 2013 mencapai titik terendah kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur yakni sebesar 6,06 persen. Namun pada tahun 2014 (kondisi maret) terjadi kenaikan angka kemiskinan hingga mencapai angka 6,42 persen. Kondisi ini perlu diwaspadai mengingat angka kemiskinan kondisi Maret ini belum merupakan imbas kenaikan BBM pada triwulan keempat tahun 2014 seperti gambar 2014.

Gambar 2.14.
Persentase Penduduk Miskin
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2014 (%)



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur Tahun 2014

*) Data Prov. Kaltim termasuk Kaltara (Kondisi Bulan Maret)

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

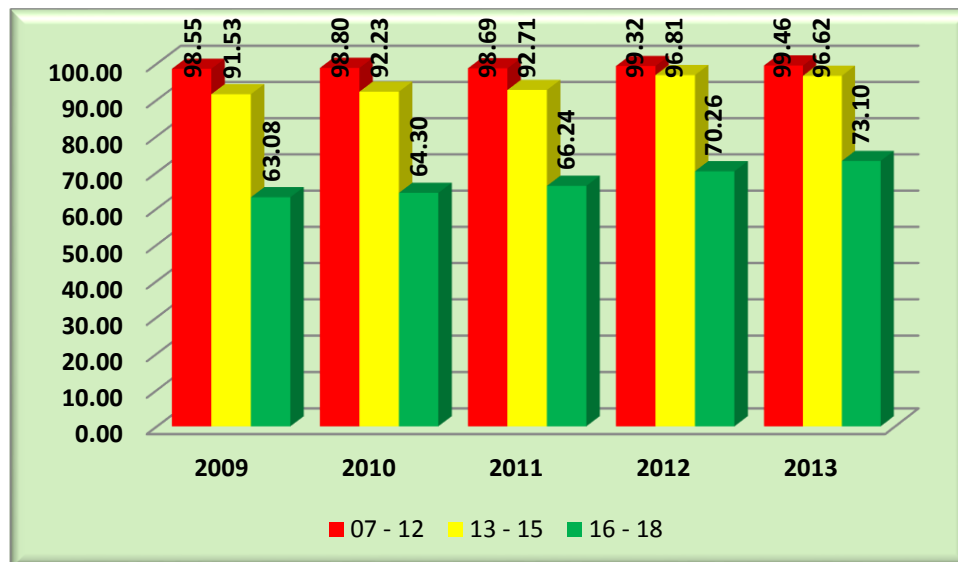
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

1) Pendidikan

Salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan pendidikan adalah dengan menganalisis Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan seberapa banyak atau besar penduduk usia sekolah yang telah menikmati pendidikan tanpa melihat jenjang pendidikannya.

Secara umum, peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Semakin tingginya persentase penduduk usia sekolah yang mengenyam pendidikan merupakan target mutlak yang harus dicapai oleh pemerintah. APS Provinsi Kalimantan Timur di setiap jenjang usia sekolah terus mengalami trend kenaikan yang mengindikasikan jumlah penduduk usia sekolah mengenyam pendidikan semakin meningkat seperti terlihat pada gambar 2.15.

Gambar 2.15.
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kategori Umur
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 (%)



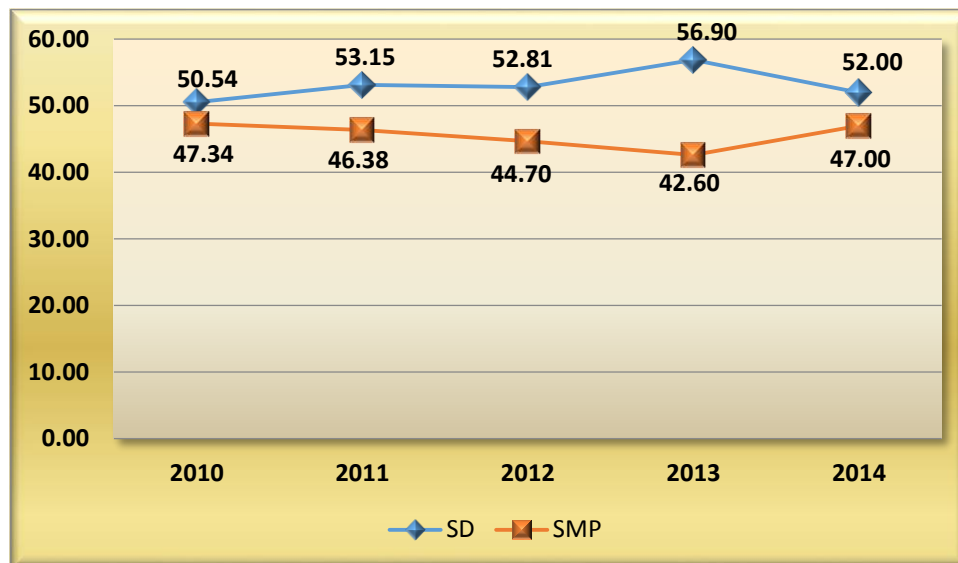
Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur, 2014

a) Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ini menggambarkan tingkat ketersediaan sekolah per jumlah penduduk usia sekolah. Capaian ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah sekolah. Pada jenjang SD/MI meningkat dari 50,54 pada tahun 2010 menjadi 52 pada tahun 2014 yang berarti

terdapat sebanyak 52 gedung sekolah SD/MI yang tersedia untuk 10.000 penduduk usia sekolah 7-12 tahun. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs dari 47,34 pada tahun 2010 menjadi 47 pada tahun 2014 yang berarti terdapat sebanyak 47 gedung sekolah SMP/MTs yang tersedia untuk 10.000 penduduk usia sekolah 13-15 tahun seperti pada gambar 2.16.

Gambar 2.16
Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014



Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, 2014

b) Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio ini menggambarkan tingkat perbandingan guru terhadap murid untuk melihat kecukupan jumlah guru di suatu wilayah terhadap jumlah murid yang harus diajar. Pada Provinsi Kalimantan Timur, rasio guru dan murid pada jenjang pendidikan dasar selama tahun 2009-2014 sudah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar yang mensyaratkan rasio guru dan murid sebesar 1:32 seperti pada tabel 2.7.

Tabel 2.7
Rasio Murid terhadap Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2014

Rasio Murid Terhadap Guru	T A H U N					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
SD Negeri	17	16	17	13	14	24
SD Swasta	17	12	17	13	14	6
Madrasah Ibtidaiyah	12	15	13	13	14	9
SMP Negeri	15	15	15	11	13	18



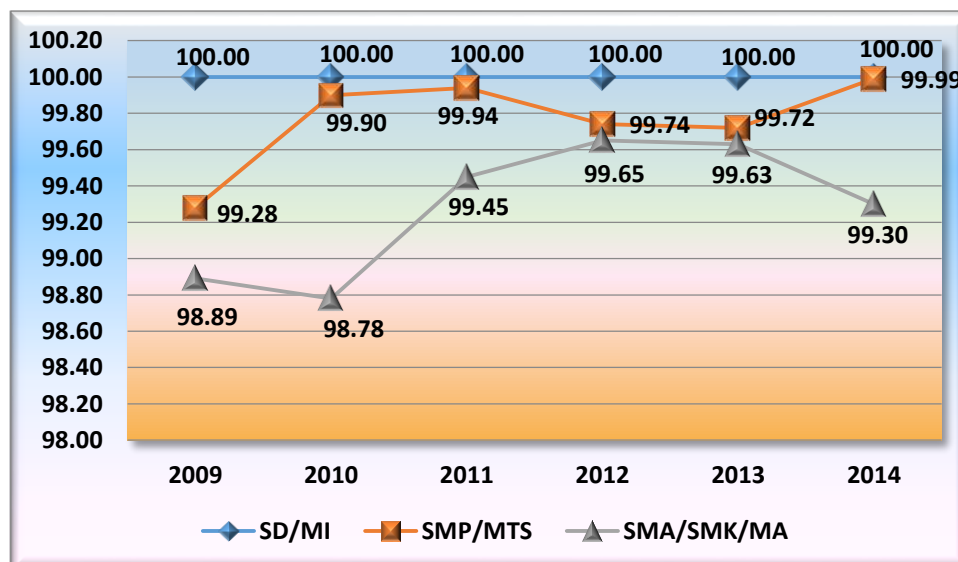
Rasio Murid Terhadap Guru	T A H U N					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
SMP Swasta	9	9	8	9	11	8
Madrasah Tsanawiyah	9	9	9	12	11	8
SMA Negeri	14	14	13	13	14	20
SMA Swasta	11	10	10	12	8	8
Madrasah Aliyah	6	6	6	5	8	6
SMK	12	12	9	12	12	18

Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Timur, 2014

c) Angka Kelulusan

Secara umum angka kelulusan di semua jenjang pendidikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami kenaikan. Pada jenjang SMP/MTs mengalami penurunan pada tahun 2012. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus oleh dinas terkait karena meskipun sudah mencapai persentase yang cukup tinggi, namun penurunan ini tetap perlu diwaspadai meskipun pada tahun 2014 angka kelulusan mencapai 99,99 persen. Sedangkan pada SMA/SMK/MA, angka kelulusan pada tahun terakhir mengalami penurunan hingga menjadi 99,30 persen terlihat pada gambar 2.17.

Gambar 2.17
Angka Kelulusan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2014



Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Timur, 2014

**2) Kesehatan**

Jumlah tenaga medis dan paramedis selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami perkembangan cukup signifikan bila dibandingkan dengan fasilitas kesehatan yang lain. Peningkatan jumlah dokter, tenaga medis maupun paramedis akan berdampak kepada pelayanan kesehatan masyarakat khususnya kemudahan dalam mendapatkan pelayanan berobat maupun konsultasi kesehatan.

Peningkatan indikator kesehatan tidak hanya terjadi dalam hal peningkatan tenaga medis dan paramedis saja, masyarakat yang mendapat pertolongan oleh tenaga kesehatan terlatih juga meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2009, persentase penduduk yang mendapat pertolongan tenaga kesehatan terlatih sebesar 85,24 persen dan pada tahun 2013 meningkat hingga mencapai angka 90,86 persen.

Jika melihat peningkatan mutu dan pelayanan di bidang kesehatan secara keseluruhan, tidak salah jika indikator kesehatan masyarakat seperti angka usia harapan hidup meningkat dari 71,00 pada tahun 2009 menjadi 71,78 pada tahun 2013. Selain itu menurunnya angka kematian bayi yaitu dari 27,4 pada tahun 2009 menjadi 16,7 bayi yang meninggal dari 1000 kelahiran pada tahun 2010 menjadi poin tersendiri bagi indikasi peningkatan pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur seperti tabel 2.8.

Tabel 2.8
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Kesehatan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2014

No	Indikator	Satuan	TAHUN					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Dokter Umum	orang	663	665	673	794	1.121	1.019
2.	Dokter Spesialis	orang	264	281	215	276	620	569
3.	Dokter Gigi	orang	212	213	276	262	421	300
4.	Perawat	orang	4.966	4.960	5.619	5.777	5.633	7.181
5.	Penyebaran HIV Aids	orang	217	413	473	479	558	423
6.	Rasio Dokter per 1000 satuan Penduduk	orang	0,43	0,38	0,37	0,41	0,66	0,56
7.	Rasio Bidan per 1000 satuan Penduduk	orang	46,32	46	45,09	60	70	66
8.	Angka Morbiditas (persen)	persen	17,32	16,88	11,74	12,19	9,18	9,18
9.	Kelahiran ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih	orang	85,24	87,35	88,61	90,83	90,86	90,86
10.	Penduduk dengan pengobatan sendiri	orang	69,19	71,95	65,47	70,39	81,58	81,5
11.	Penduduk dengan	orang	28,88	30,31	22,46	22,33	18,99	18,99



No	Indikator	Satuan	TAHUN					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Keluhan Kesehatan							
12.	Angka Kematian Bayi	orang	27,40	16,70	21	21,00	21,00	20,00
13.	Angka Kematian Balita	orang	38	32,00	38,00	31,00	32,00	29,00
14.	Angka Kematian Ibu	orang	110,00	101,00	92,00	90,00	70,5	81,00
15.	Usia Harapan Hidup	tahun	71,00	71,20	71,40	71,58	71,78	71,78
16.	Persentase Gizi Balita (Gizi Baik)	persen	93,23	75,9	77,69	77,6	77,60	79,5

Sumber: BPS Prov. Kaltim, Dinas Kesehatan Prov. Kaltim

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Ditengah terpuruknya sektor batubara dan migas di Kaltim, perekonomian Kalimantan Timur tetap menjajikan bagi investasi, pada tahun 2014 rasio investasi Kaltim mencapai 40 persen menempati urutan ke 4 nasional setelah berturut turut DKI Jakarta 67 persen, Jawa Barat 58 persen dan Jawa Timur 41 persen. Rasio investasi adalah rasio realisasi investasi terhadap minat investasi dan merupakan gambaran bagaimana peran pemda terhadap arus investasi yang dipengaruhi oleh kepastian hukum, jaminan keamanan, stabilitas ketenaga kerjaan serta kemudahan perijinan bagi investasi yang masuk. Investasi yang masuk ke Kaltim masih di dominasi oleh eksploitasi SDA tak terbarukan, ke depan harus di dorong investasi yang memberikan nilai tambah sesuai dengan potensi yang dimiliki Kaltim. Dalam konteks inilah percepatan pelaksanaan transformasi ekonomi sangat menentukan keberhasilan pembangunan di Kaltim. Perkembangan jumlah investor PMDN/PMA di Provinsi Kalimantan Timur seperti tabel 2.9.

Tabel 2.9
Jumlah Investor PMDN/PMA
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014

Tahun	PMDN	PMA	Total
2010	37	48	85
2011	47	135	172
2012	38	152	190
2013	92	331	423
2014	60	297	357

Sumber: BPPMD Prov. Kaltim Tahun 2014



Hasil analisis nilai PMDN/PMA di Provinsi Kalimantan Timur seperti tabel 2.10.

Tabel 2.10
Jumlah Investasi PMDN dan PMA
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2014

PMDN				
Tahun	Persetujuan (Rp)		Realisasi (Rp)	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2011	68	68.472.979.882.521	47	14.469.718.209.335
2012	30	8.914.776.900.000	38	7.608.479.500.000
2013	236	34.110.240.300.000	92	18.180.065.600.000
2014	48	41.671.586.676.329	60	12.983.049.700.000
PMA				
Tahun	Persetujuan (US \$)		Realisasi (US \$)	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2011	39	11.915.793.951	135	1.168.617.125
2012	108	3.928.594.000	152	2.437.997.400
2013	313	7.000.051.400	331	1.324.197.420
2014	54	3.146.114.700	297	2.145.665.101

Sumber: BPPMD Prov. Kaltim Tahun 2014

2. Rasio daya serap tenaga kerja

Rasio daya serap akan melihat bagaimana investasi yang ditanamkan di Kalimantan Timur menyerap tenaga kerja (penduduk Kalimantan Timur maupun migran). Selanjutnya rasio daya serap tenaga kerja dari nilai investasi baik PMDN maupun PMA di Kalimantan Timur seperti tabel 2.11.

Tabel 2. 11
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2014

PMDN					
No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMDN	9.336	48.630	31.905	9.505
2	Jumlah proyek seluruh PMDN	47	38	92	60
3	Rasio daya serap tenaga kerja	198,64	1.279,74	346,79	158,42



PMA					
No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMA	7.112	33.308	65.706	27.055
2	Jumlah proyek seluruh PMA	135	152	331	297
3	Rasio daya serap tenaga kerja	52,68	219,13	198,51	91,09

Sumber: BPPMD Prov. Kaltim Tahun 2014

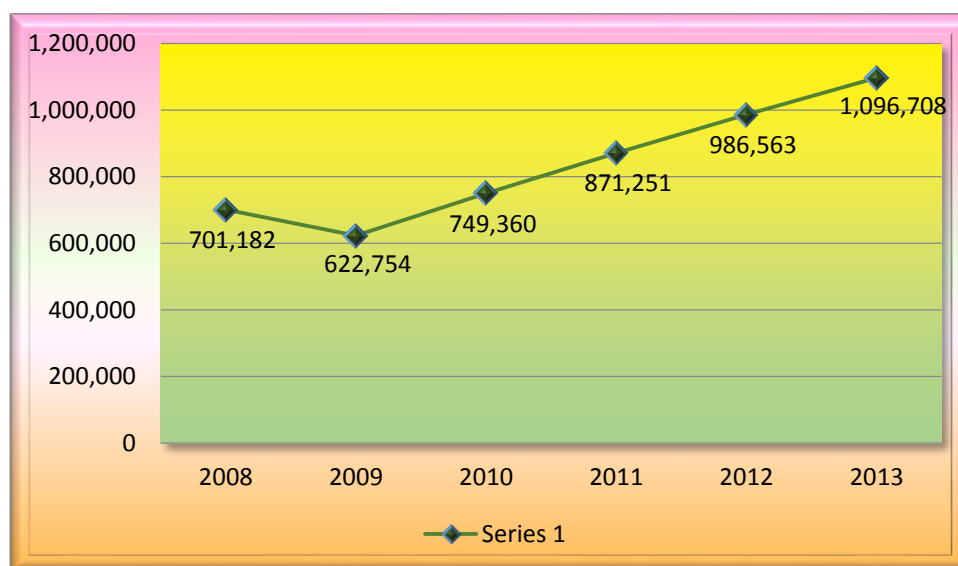
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Fokus kemampuan ekonomi daerah salah satunya diukur dengan indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Rata-rata pengeluaran per kapita meningkat selama empat tahun terakhir hingga pada tahun 2013 mencapai angka Rp. 1.096.708,-. Jika dilihat secara rinci berdasarkan kategori makanan dan non makanan maka pada tahun 2013, rata-rata pengeluaran konsumsi non makanan per kapita (53,62 persen) lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan (46,38 persen). Bergesernya fokus konsumsi penduduk dari konsumsi makanan ke konsumsi non makanan, mengindikasikan bahwa secara umum kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur sudah lebih baik seperti gambar 2.18.

Gambar. 2.18
Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Per Kapita/Bulan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur, 2014

*Data Prov. Kaltim termasuk Kaltara



2. Nilai Tukar Petani

Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun biaya produksi pertaniannya. NTP akan memperlihatkan kemampuan daya beli petani di wilayah pedesaan sehingga perekonomian petani dapat dianalisis terkait kesejahteraannya. NTP di Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu 2010-2014 relatif meningkat lambat. Pada tahun 2010 Nilai Tukar Petani 99,82 menjadi 99,93 pada tahun 2014.

Jika dilihat berdasarkan nilai tukar per sub sektornya, hampir semua indeks kelompok mengalami penurunan kecuali nilai tukar petani dari kelompok hortikultura. NTP yang ada menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani di Kaltim masih mengkhawatirkan dan perlu menjadi perhatian yang serius. Kondisi yang berlarut dikhawatirkan akan berdampak pada semakin tidak menariknya sektor pertanian bagi generasi muda. Padahal Kaltim sedang berusaha beralih dari ekonomi yang didukung sumber daya tidak dapat diperbaharui ke arah ekonomi yang didukung sumberdaya yang dapat diperbaharui seperti tabel 2.12.

Tabel . 2.12
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014

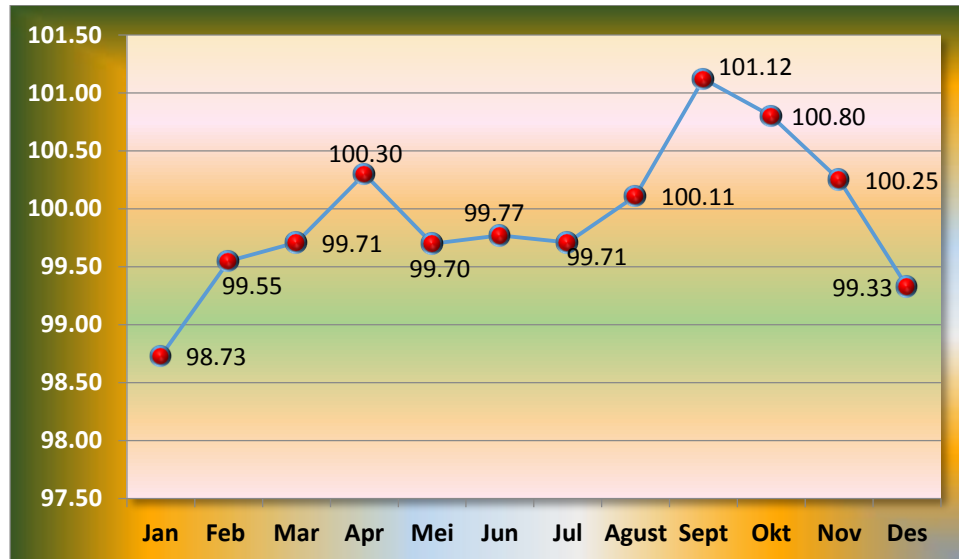
No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014*)
1	Indeks Yang Diterima Petani (It)	122,15	125,34	129,43	130,69	111,58
2	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	122,37	126,94	132,02	137,14	111,66
3	Nilai Tukar Petani (NTP)	99,82	98,74	98,04	95,30	99,93

*) BPS Prov. Kaltim 2014

* Termasuk Kaltara

Kondisi tahun 2014, terdapat beberapa NTP pada bulan-bulan tertentu mencapai lebih dari 100 persen. Namun jika dirincikan dalam bulan selama tahun 2014, maka terjadi NTP yang cukup fluktuatif dimana paling tinggi berada pada bulan September (101,12 persen) dan titik terendah berada pada bulan Januari (98,73 persen) seperti gambar 2.19.

Gambar 2.19
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur
Bulan Januari s/d Desember Tahun 2014 (persen)



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur, Januari 2015

* Termasuk Kaltara

3. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan (Persentase Konsumsi RT untuk Non Pangan)

Kenaikan persentase konsumsi rumah tangga non makanan di tiap tahunnya, secara umum menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan konsumsi rumah tangga sudah mulai fokus ke pengeluaran barang sekunder maupun tersier yang merupakan kebutuhan penunjang kehidupan dan tidak hanya memikirkan pemenuhan kebutuhan dasarnya (terutama makanan) seperti tabel 2.13.

Tabel 2.13
Konsumsi Rumah Tangga non Makanan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2013

No	Uraian	TAHUN			
		2010	2011	2012	2013*
1	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan Non Makanan (Rp)	385.993	467.532	535.643	588.003
2	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan (Rp)	749.360	871.251	986.563	1.096.708
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan (persen)	51,51	53,66	54,29	53,62

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

*) Termasuk Kaltara

**2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur****1. Luas wilayah produktif**

Permasalahan legalisasi perencanaan pembangunan berupa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur, RTRW Kabupaten/Kota, dan Peraturan Zonasi belum mencapai sebuah kesepakatan. Pengembangan luas wilayah produktif harus terus mendapat kawalan dari instansi terkait mengingat produktifitas pertanian, perkebunan maupun pemukiman merupakan lahan yang bersentuhan langsung ke masyarakat Kalimantan Timur. Gambaran tentang luas wilayah produktif seperti tabel 2.14.

Tabel 2.14
Rasio Luas Wilayah Produktif (Pertanian, Perkebunan, dan Permukiman)
terhadap Luas Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif (Ha)	Luas Wilayah Budidaya Non Kehutanan (Ha)	Rasio (persen)
1.	Berau	370.716	536.320	62,12
2.	Kutai Barat + Mahakam Ulu	515.012	862.681	59,70
3.	Kutai Kertanegara	420.324	936.710	44,87
4.	Kutai Timur	472.421	942.679	50,11
5.	Penajam Paser Utara	113.402	145.011	78,20
6.	Paser	301.226	445.964	67,54
7.	Balikpapan	22.538	34.069	66,15
8.	Bontang	5.643	10.002	56,42
9.	Samarinda	13.320	68.888	19,34
J u m l a h		2.234.602	3.982.325	56,11

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur, 2013

2. Infrastruktur Pembangunan

Kemajuan pembangunan infrastruktur terkait sarana dan prasarana wilayah diukur dari kemajuan pembangunan fisik yang meliputi pembangunan jalan, jembatan, perhubungan sungai, perhubungan udara, perhubungan laut, kawasan industri, air baku dan bersih, jaringan irigasi, serta perumahan.

Penyediaan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan pokok penduduk Kalimantan Timur seperti listrik dan air bersih masih belum maksimal dalam pencapaian pembangunannya. Hal ini terlihat pada minimnya cakupan pelayanan air bersih sebesar 35 persen dengan kapasitas produksi 6.435 liter/dt.



Konektivitas jalan lintas Kalimantan di wilayah Kalimantan Timur dapat dikelompokkan menjadi tiga poros yaitu,

1. Poros Selatan, menghubungkan kawasan Batu Aji/Kerang Dayu - Tanah Grogot - Balikpapan - Samarinda - Bontang - Sangatta - Muara Wahau - Tanjung Redeb - Tanjung Selor - Malinau - Sei Simanggaris - Sei Ular.
2. Poros Tengah, menghubungkan kawasan Samarinda - Loa Janan - Tenggarong - Senoni - Kota Bangun - Sp. Blusuh - Batas Kalimantan Tengah.
3. Poros Utara, menghubungkan Batas Kalimantan Tengah - Simanggaris.

Pembangunan infrastruktur perhubungan dihadapkan pada permasalahan masih rendahnya rasio panjang jalan terhadap luas wilayah, dimana angka rasionya menunjukkan 52,53 km/1.000 km² (terdapat jalan sepanjang 52,53 km di dalam wilayah seluas 1000 km²) dibawah rasio nasional yaitu 115 km/1.000 km². Hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur perhubungan memiliki beberapa kendala seperti :

1. Konsentrasi penduduk yang masih tidak merata dalam satuan kecil dan terpencil, serta kondisi topografi yang berat;
2. Kendala pembebasan lahan dan penetapan harga yang disepakati oleh appraisal;
3. Keterbatasan anggaran sehingga alokasi dana tidak proposional sesuai kebutuhan. Hal ini menyebabkan belum terpenuhinya target jalan mantap baik nasional maupun provinsi dan belum tuntasnya pembangunan jalan lintas kalimantan;
4. Pembangunan jalan diperbatasan terkendala fungsi dan status kawasan lindung;
5. Masih ada beberapa pembangunan infrastruktur yang belum ada kesepakatan pembiayaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
6. Dukungan swasta belum optimal.

Berdasarkan data Dinas PU untuk panjang jalan nasional dan provinsi Tahun 2013, seperti tabel 2.15.

Tabel 2.15
Panjang Jalan Nasional dan Provinsi (Km) menurut jenis permukaan dan kondisi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

No	Status Jalan	Panjang Jalan	Jenis Permukaan				Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
			Aspal	Kerikil	Tanah	Lainnya				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Nasional	2.118,17	1.333,25	21,96	75,21	63,27	1.062,66	285,03	83,51	62,48
2.	Provinsi	1.762,02	954,34	246,05	369,60	26,40	452,98	329,52	251,39	562,49

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur, 2014



Sebagai upaya meningkatkan pelayanan transportasi udara diprogramkan pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB), dan sampai saat ini telah terbangun Gedung Terminal Penumpang dengan luas 12.700 m² dengan daya tampung 1,5 Juta/Tahun. Untuk memfungsikan bandara ini, akan dituntaskan pembangunan sisi udara melalui skema pembiayaan MYC Tahun 2014 – 2018 dengan target panjang runway 2.250 meter, sedangkan untuk Apron dan Taxiway akan didanai melalui APBN.

Pengembangan Bandara Kalimarau, Berau telah dilaksanakan berupa perpanjangan landasan pacu dari 1.850 meter menjadi 2.250 meter sehingga dapat didarati oleh pesawat Boeing 737-300 dan Airbus A-319. Selain itu, telah dibangun pula Terminal Penumpang Baru seluas 9.000 m² dengan Garbarata 2 unit.

Bandara Data Dawai di Kecamatan Long Pahangai saat ini memiliki runway sepanjang 1.600 x 30 m sehingga mampu didarati pesawat ATR-42. Perpanjangan runway yang telah dilakukan meningkatkan kapasitas angkut serta membuka keterisolasian Kecamatan Long Pahangai melalui moda transportasi udara.

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan Air Baku, peningkatan produktifitas pertanian dan pengendalian daya rusak air, pemerintah sedang membangun prasarana sumber daya air meliputi pembangunan Bendungan Marangkayu, Bendungan Wain, Bendungan Muara Bangun, Bendung Siti, Bendung Lombok, embung Muru dan Sumur Kariangau serta pembangunan jaringan irigasi baru sepanjang 23.599 Meter.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Kadaan suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap daya tarik investor dalam menanamkan modalnya untuk berusaha di wilayah tersebut. Iklim investasi yang positif dibangun dari kondusifnya wilayah dari segi keamanan, demokrasi, politik, hingga unsur sosial budaya. Hal ini dikarenakan keamanan berinvestasi akan menjamin keberlangsungan dan konsistensi gerak perekonomian suatu wilayah sehingga para investor berbondong-bondong menanamkan modal dan mengembangkan perekonomian wilayah.

Dalam upaya mempercepat dan menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi, maka iklim investasi merupakan salah satu faktor kunci yang berperan penting. Salah satu variabel yang digunakan dalam mengukur iklim investasi adalah faktor birokrasi, dalam hal ini lamanya proses perijinan investasi. Seiring dengan, Gubernur Kalimantan Timur dengan menerbitkan Pergub Kalimantan Timur No. 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan PTSP yang Berada Dibawah Badan Penanaman Modal & PTSP (BPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur. PTSP diberi kewenangan memproses dan menerbitkan izin/non izin yang menjadi kewenangan provinsi.



keberhasilan kelembagaan PTSP akan terukur pada lama waktu proses perizinan paling tidak sudah sesuai SOP dan ada kepastian waktu yang dapat diprediksikan oleh pemohon izin/non izin. pada tahun 2014 PTSP kalimantan timur sudah mampu menerapkan SOP yang lama waktu proses penerbitan izin/non izin bidang penanaman modal rata-rata dapat diselesaikan dalam waktu 3,23 hari, walaupun dalam SOP ditetapkan 5 hari kerja maksimalnya.

1) Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas menunjukkan bagaimana situasi keamanan di suatu wilayah sehingga aktivitas masyarakat bisa dilakukan dengan nyaman tanpa rasa takut. Angka kriminalitas di Kalimantan Timur cukup fluktuatif dimana pada tahun 2012 angka kriminalitas mencapai 28,92 yang berarti terjadi 28-29 tindak kriminalitas pada setiap 10.000 penduduk. Secara rinci angka kriminalitas Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011-2014 seperti tabel 2.16.

Tabel 2.16
Angka Kriminalitas
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2014

No	Jenis Kriminal	2011	2012	2013	2014
1.	Kasus Narkoba	503	715	761	754
2.	Kasus Pembunuhan	25	57	29	25
3.	Kejahatan Seksual	201	279	195	173
4.	Kasus Penganiayaan	447	897	874	829
No	Jenis Kriminal	2011	2012	2013	2014
5.	Kasus Pencurian	2.734	2.450	2.352	2.134
6.	Kasus Penipuan	613	627	623	472
7.	Kasus Pemalsuan uang	8	8	7	2
8.	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	9.238	11.234	10.616	10.281
9.	Jumlah Penduduk	3.690.520	3.884.793	3.548.124	3.864.566
10.	Angka Kriminalitas	25,03	28,92	33,42	37,57

Sumber: Polda Kalimantan Timur, Maret 2015

2) Jumlah Demonstrasi

Demonstrasi menunjukkan kebebasan aspirasi masyarakat dalam berpendapat jika dilakukan dengan damai dan tujuan yang jelas. Namun jika demonstrasi dilakukan dengan diiringi kekerasan maka sudah menyalahi konsep dasar sebuah demokrasi. Pada tahun 2013 terjadi demonstrasi sebanyak 388 kali dimana terjadi penurunan jika dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 424 kali. Secara rinci, jumlah demonstrasi seperti tabel 2.17.



Tabel 2. 17
Jumlah Demonstrasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2014

No	Uraian	T A H U N			
		2011	2012	2013	2014
1	Bidang Politik	17	9	6	20
2	Ekonomi	134	246	226	247
3	Kasus Pemogokan Kerja	12	169	156	73
Jumlah Unjuk Rasa		151	424	388	340

Sumber: Polda Kalimantan Timur, Maret 2015

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan merupakan pondasi awal dan sebagai tujuan akhir dari pembangunan daerah. Namun untuk mencapai pembangunan yang diinginkan, tidak hanya kuantitas penduduk saja yang dibutuhkan, melainkan sumber daya manusia berkualitaslah yang menjadi harapan utama penyokong pembangunan suatu daerah.

Selain itu indikator-indikator yang di sepakati dalam dokumen RKPD 2016 telah dilakukan sinergi dengan kebijakan nasional khususnya pada dukungan daerah untuk mencapai target indikator Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015 pada tujuan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Dengan demikian capaian indikator MDGs Kalimantan timur akan memberi kontribusi terhadap pencapaian MDGs Nasional.

Indikator paling mudah dalam melihat kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh masyarakat. Selain itu, kelompok umur produktif dan non produktif juga dapat dijadikan acuan dalam menunjang analisis beban kualitas sumber daya manusia. Analisis kinerja atas sumber daya manusia dapat dilakukan terhadap indikator rasio lulusan S1/S2/S3 yang dianggap sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan rasio ketergantungan yang menggambarkan ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk produktif.

A. Kualitas Pendidikan Penduduk (*Rasio Lulusan S1/S2/S3*)

Semakin banyak penduduk mengenyam pendidikan maka semakin berkualitas sumber daya manusia yang ada di suatu daerah. Sarjana merupakan pendidikan tertinggi yang dapat diduduki oleh penduduk di perguruan tinggi dengan jenjang S1, S2, maupun S3. Penduduk yang sudah berijazah S1, S2, atau bahkan S3 sudah dianggap memiliki kualifikasi



ahli sehingga memiliki daya saing dan daya tawar tinggi terhadap lapangan usaha. Hasil analisis rasio lulusan S1/S2/S3 seperti tabel 2.18.

Tabel 2.18
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2014

No	Uraian	T A H U N		
		2012/2013	2013/2014	2014/2015
1.	Jumlah Lulusan S1	1.479	1.512	4.414
2.	Jumlah Lulusan S2/S3	591	636	579
3.	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	2.070	2.148	4.993
4.	Jumlah Penduduk	3.216.101	3.300.517	3.351.400
Angka kelulusan S1/S2/S3		6,44	6,51	14,90

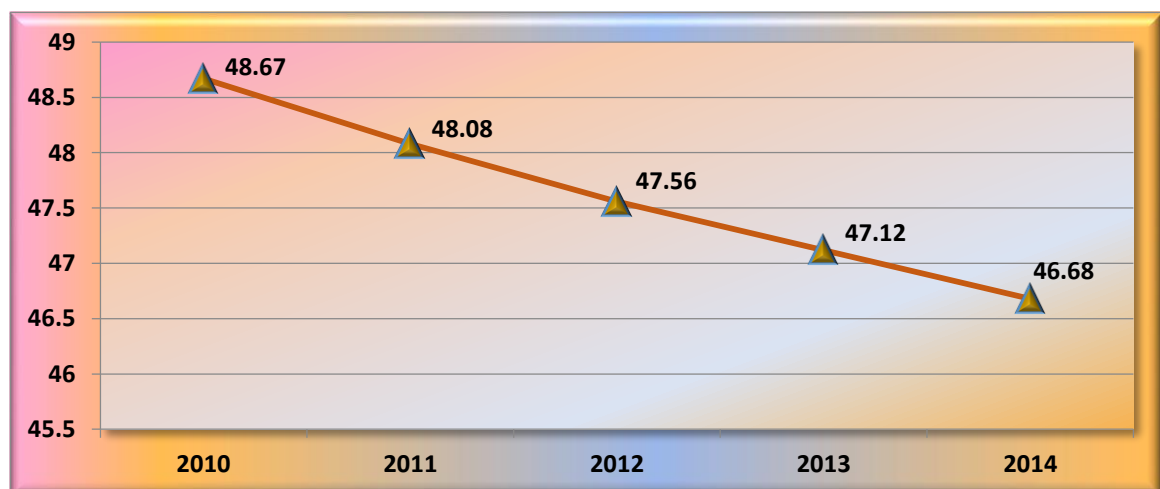
Sumber: Universitas Mulawarman Tahun 2015

Pada tahun 2014/2015 jumlah lulusan S1/S2/S3 hanya sebesar 4.993 orang dari total penduduk yang ada di Provinsi Kalimantan Timur yang sejumlah 3.351.400 orang sehingga kelulusan hanya 14,90.

B. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Selain melihat pada segi kualitas pendidikan, produktivitas penduduk juga ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) serta usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hasil analisis rasio ketergantungan seperti gambar 2.20.

Gambar. 2.20
Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014*



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur, 2014

*Termasuk Kaltara



Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dalam lima tahun terakhir, pada posisi tahun 2010 rasio ketergantungan di Kaltim sebesar 48,67. Artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 48-49 penduduk usia tidak produktif. Pada tahun 2014 rasio ini mengalami penurunan menjadi 46,68. Artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 46-47 penduduk usia tidak produktif. Semakin rendah rasio ketergantungan maka semakin baik bagi proses pembangunan. Disamping itu, semakin banyak penduduk usia produktif, semakin besar peluang untuk mencapai tujuan akhir bonus demografi dimana penduduk usia produktif sebagai sumber daya utama dalam memajukan perekonomian di Kaltim.

Berdasarkan data kinerja pembangunan sebagaimana dijelaskan di atas dan data kinerja daerah lainnya yang diolah dalam kertas kerja sesuai dengan amanat pada lampiran 1 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, maka secara keseluruhan indikator pembangunan Provinsi Kalimantan Timur selama tiga tahun terakhir seperti tabel 2.19.

Tabel 2.19
Aspek, Fokus dan Indikator Kinerja
Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2014

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket
			2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
I	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1.1	Jumlah Penduduk	Jiwa	3.123.400	3.199.700	3.300.517	3.351.400	
1.2	Pertumbuhan Ekonomi	persen	6,28	3,75	2,72	2,02	Termasuk Kaltara
1.3	Laju Inflasi	persen	6,35	5,60	9,65	7,66	
1.4	Pendapatan per Kapita	Juta Rp	44,62	48,30	47,52	-	Termasuk Kaltara
1.5	Indeks Gini		0,3325	0,3555	0,3341	-	data tahun 2014 belum dipublikasi oleh BPS
1.6	Pemerataan Pendapatan Versi World Bank						
	- 40persen Rendah	persen	19,75	18,95	19,77	-	data tahun 2014 belum dipublikasi oleh BPS
	- 40persen Sedang	persen	38,07	36,37	37,67	-	data tahun 2014 belum dipublikasi oleh BPS
	- 20persen Tinggi	persen	42,19	44,68	42,55	-	data tahun 2014 belum dipublikasi oleh BPS
1.7	Indeks Ketimpangan Kemakmuran		0,302	0,281	-	-	data tahun 2014 belum dipublikasi oleh BPS



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket
			2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.8	Persentase penduduk miskin	persen	6,77	6,68	6,06	6,42	
1.9	Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan	kasus	5.220	6.405	6.686	6.722	
Fokus Kesejahteraan Masyarakat							
1	Pendidikan						
1.1	Angka Melek Huruf	persen	97,21	97,55	97,95	98,30	
1.2	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	9,19	9,22	9,39	9,60	
1.3	APK SD/MI	persen	104,83	107,76	107,57	113,75	
1.4	APK SMP/MTs	persen	97,62	93,24	91,06	97,77	
1.5	APK SMA/SMK/MA	persen	73,00	80,08	82,21	87,51	
1.6	APM SD/ MI	persen	92,23	94,37	95,91	97,68	
1.7	APM SMP/MTs	persen	72,40	74,37	76,01	89,12	
1.8	APM SMA/SMK/MA	persen	54,58	59,75	62,22	76,49	
2	Kesehatan						
2.1	Angka Harapan Hidup	tahun	71,40	71,58	71,78	71,78	
2.2	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup		94	111	120	81	
2.3	Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup		-	21	20	20	
2.4	Persentase Balita Gizi Buruk	persen	-	-	3,9	-	data tahun 2014 belum dipublikasi oleh BPS
3	Ketenagakerjaan						
3.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	9,88	8,80	7,94	7,54	
Fokus Budaya dan Olahraga							
1	Kebudayaan						
1.1	Jumlah Grup Kesenian	unit	538	628	745	715	
1.2	Jumlah Gedung Kesenian	unit	28	28	30	31	
2	Pemuda dan Olahraga						
2.1	Jumlah Klub Olahraga	unit	1010	1021	1045	-	Data Tahun 2014 belum dilakukan survey oleh Dispora



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket
			2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.2	Jumlah Gedung Olahraga	unit	37	38	38	38	Data Dispora
ASPEK PELAYANAN UMUM							
Fokus Layanan Urusan Wajib							
1	Pendidikan						
1.1	Pendidikan Dasar						
1.1.1	Angka Partisipasi Sekolah 7-12 tahun	persen	98,68	99,17	99,46	-	data tahun 2014 belum dipublis oleh BPS
1.1.2	Rasio murid terhadap sekolah						
	- SD Negeri	persen	208	196	215	216	
	- SD Swasta	persen	206	230	249	246	
	- MI	persen	154	154	125	166	
1.1.3	Rasio murid terhadap guru						
	- SD Negeri	persen	17	13	14	14	
	- SD Swasta	persen	17	13	14	14	
	- MI	persen	13	13	14	12	
1.1.4	Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah		4.955	4.799	56,90	-	data tahun 2014 belum dipublis oleh BPS
1.2	Pendidikan menengah						
1.2.1	Angka Partisipasi Sekolah						
	- 13-15 tahun	persen	92,78	96,53	96,62	-	
	- 16-18 tahun	persen	67,60	71,16	73,10	-	
1.2.2	Rasio murid terhadap sekolah						
	- SMP Negeri	persen	266	266	286	276	
	- SMP Swasta	persen	109	141	149	154	
	- MTs	persen	142	156	153	165	
	- SMA Negeri	persen	358	371	371	385	
	- SMA Swasta	persen	118	200	113	121	
	- MA	persen	108	111	120	122	
	- SMK	persen	260	332	264	322	
1.2.3	Rasio murid terhadap guru						
	- SMP Negeri	persen	15	11	13	13	
	- SMP Swasta	persen	8	9	11	11	
	- MTs	persen	9	12	11	10	
	- SMA Negeri	persen	13	13	14	14	
	- SMA Swasta	persen	10	12	8	8	
	- MA	persen	6	5	8	7	
	- SMK	persen	9	12	12	12	
1.2.4	Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah						
	- Sekolah Dasar	persen	53,15	52,81	56,90	52,00	



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket
			2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	- Menengah Pertama	persen	46,38	44,70	42,60	47,00	
1.3	Angka Putus Sekolah						
	- SD/MI	persen	0,39	0,32	0,16	-	data tahun 2014 belum dipublis oleh BPS
	- SMP/MTa	persen	6,51	3,04	2,87	-	data tahun 2014 belum dipublis oleh BPS
	- SMA/SMK/MA	persen	32,23	28,39	26,64	-	data tahun 2014 belum dipublis oleh BPS
1.4	Angka Kelulusan						
	- SD/MI	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- SMP/MTs	persen	99,94	99,74	99,72	99,99	
	- SMA/SMK/MA	persen	99,45	99,64	99,63	99,30	
2	Kesehatan						
2.1	Rasio jumlah dokter terhadap penduduk	Orang	0,37	0,41	0,57	0,56	
2.2	Rasio jumlah puskesmas+pustu terhadap penduduk	Orang	0,25	0,23	0,24	0,23	
2.3	Rasio posyandu per satuan balita		0,283	0,273	-	-	data tahun 2014 belum dipublis oleh BPS
2.4	Rasio tenaga medis per satuan penduduk		0,15	0,15	0,40	0,44	
2.5	Kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	Kelahiran	88,61	90,83	90,86	-	data tahun 2014 belum dipublis oleh BPS
2.6	Persentase penduduk dengan keluhan kesehatan	persen	22,46	22,33	18,99	-	data tahun 2014 belum dipublis oleh BPS
2.7	Morbiditas (Angka Kesakitan)	persen	11,74	12,19	9,18	-	data tahun 2014 belum dipublis oleh BPS
2.8	Cakupan Puskesmas	persen	167	167	189	-	data tahun 2014 belum dipublis oleh BPS
3	Pekerjaan Umum						
3.1	Panjang Jalan Provinsi	Km	1.762,07	1.762,07	1.762,07	1.762,07	
3.2	Kondisi jalan baik	persen	1.140,59	1.026,89	495,98	-	Data tahun 2014 belum dipublis oleh PU
3.3	Irigasi dalam	m	20.956	17.470	12.825	-	



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket
			2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	kondisi baik						
3.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	persen	66,56	72,15	75,93	-	
4	Perumahan						
4.1	Persentase rumah tangga dengan sumber air bersih	persen	80,01	82,18	80,87	-	
4.2	Persentase rumah tangga dengan air minum layak	persen	34,44	31	-	-	
4.3	Persentase rumah tangga dengan sanitasi layak	persen	86,31	81,89	91,09	-	
4.4	Persentase rumah tangga penerangan listrik	persen	93,59	94,63	-	78,4	
4.5	Persentase rumah layak huni	Unit	1.111	1.335	1.006	350	
5	Perhubungan						
5.1	Jumlah Kendaraan Bermotor	unit	1.672.919	2.072.704	2.013.727	2.125.111	
5.2	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Kejadian	1.440	1.185	1.094	1.228	
5.3	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	m	6,8	6,2	5,8	5,5	
5.4	Jumlah Pengguna Angkutan Umum	Orang	928.122	1.025.100	1.158.245	1.197.350	
5.5	Jumlah penumpang angkutan laut yang turun	Orang	288.008	230.291	369.779	143.452	
5.6	Jumlah penumpang angkutan laut yang naik	Orang	195.916	183.334	290.611	157.898	
5.7	Jumlah penumpang angkutan udara yang datang	Orang	2.326.301	3.314.794	3.637.215	3.799.751	
5.8	Jumlah penumpang angkutan udara yang berangkat	Orang	2.224.340	3.220.804	3.587.627	3.677.006	



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket
			2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Lingkungan Hidup						
6.2	Indeks kualitas air sungai		7,02	7,15	7,60	4,4	
6.3	Penegakan hukum lingkungan	Kasus	17	27	25	19	
6.4	Persentase sampah terangkut per hari	persen	76,24	77,50	78,50	90,3	
7	Kependudukan dan Catatan Sipil						
7.1	Kepemilikan KTP	Orang	-	-	1.121.148	-	
7.2	Kepemilikan Akta Kelahiran	Orang	-	-	1.119.104	-	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
8.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (PNS Pemprov Kaltim)	persen	37,71	38,49	15,42	-	
8.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	persen	44,22	42,01	39,96	-	
8.3	Banyaknya anak terlantar (0-21 tahun)	Anak	30.919	30.919	30.978	30.978	
9	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera						
9.1	Persentase akseptor KB terhadap PUS	persen	67,78	69,78	67,46	70,29	
9.2	Banyaknya peserta baru KB	Orang	92.814	83.944	70.336	76.760	
9.3	Persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	persen	194.032	111.052	169.910	197.919	
10	Sosial						
10.1	Banyaknya panti asuhan	Unit	134	134	134	-	
10.2	Banyaknya anak yang di asuh di panti asuhan	Anak	6.046	6.685	7.368	7.296	
10.3	Banyaknya panti wredha	Unit	4	4	3	4	
10.4	Banyaknya penghuni panti wredha	Orang	150	165	160	267	



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket
			2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	Ketenagakerjaan						
11.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	68,51	66,39	63,53	63,48	
11.2	Persentase penduduk bekerja thd usia kerja	persen	61,76	60,71	58,48	58,69	
12	Koperasi usaha kecil dan menengah						
12.1	Jumlah Koperasi	Unit	5.855	6.140	5.976	5.139	
12.2	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	408.452	424.794	441.136	424.036	
13	Penanaman Modal						
13.1	Realisasi proyek PMDN	Juta Rp	14.469.718,21	7.608.480,00	18.180.065,60	12.983.094,70	
13.2	Realisasi proyek PMA	US \$ 000	1.168.617,02	2.437.997,40	1.324.197,42	2.145.665,10	
14	Kebudayaan						
14.1	Jml. event budaya	Event	32	32	45	45	
14.2	Jumlah peninggalan sejarah dan purbakala	Unit	64	64	64	54	
14.3	Jumlah museum	Unit	8	8	8	7	
14.4	Jumlah taman budaya	Unit	2	2	2	2	
14.5	Jumlah desa kerajinan tradisional	Desa	8	8	8	7	
15	Kepemudaan						
15.1	Jumlah karang taruna	Unit	658	1.322	1.241	543	
16	Ketahanan Pangan						
16.1	Ketersediaan pangan utama	persen	74,90	72	71,76	67,46	
17	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
17.1	Jumlah LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang active	Unit	46	14	3	-	
17.2	Jumlah LSM dan Ormas	Unit	1.552	917	771	161	data Kesbangpol prov. Kaltim
18	Statistik						
18.1	Publikasi "Kabupaten/Kota Dalam Angka"		Ada	Ada	Ada	Ada	



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket
			2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18.2	Publikasi "PDRB Kabupaten/Kota"		Ada	Ada	Ada	Ada	
19	Komunikasi dan Informatika						
19.1	Website milik pemerintah daerah		Ada	Ada	Ada	Ada	
19.2	Persentase penduduk menggunakan HP	persen	94,01	94,74	-	-	Data belum di publis Diskominfo prov. kaltim
20	Perpustakaan						
20.1	Jumlah Perpustakaan	Unit	1.596	1.633	1.743	1.819	
21	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian						
21.1	Jumlah PNS	Orang	7.203	7.420	7.330	7.163	
21.2	Opini BPK	Opini	WDP	WDP	WTP	WDP	
21.3	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Nilai	68	68	68	72	
Fokus Urusan Pilihan							
1	Pertanian						
1.1	Produksi padi	Ton	425.505	424.669	439.434	432.606	
1.2	Produktivitas padi atau bahan utama lokal lainnya per Ha	Kw	42,20	41,65	42,70	48,52	
1.3	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	persen	6,19	6,42	6,62	7,96	
1.4	Kontribusi subsektor tanaman pangan terhadap PDRB	persen	0,29	0,27	0,27	0,30	
1.5	Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB	persen	2,26	2,47	2,55	3,57	
2	Kehutanan						
2.1	Kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB	persen	1,55	1,54	1,49	1,56	
3	Energi & Sumber Daya Mineral						



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket
			2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.1	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	persen	54,82	55,06	53,18	47,98	
4	Pariwisata						
4.1	Jumlah wisnus dan mancanegara	Orang	1.278.591	1.363.448	1.453.962	1.530.894	
4.2	Kontribusi subsektor pariwisata terhadap PDRB	persen	0,02	0,02	0,02	0,02	
5	Kelautan dan Perikanan						
5.1	Produksi Perikanan	Ton	103.406,4	105.392,3	136.881,5	227.210	
5.2	Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB	persen	1,34	1,42	1,60	1,82	
6	Perdagangan						
6.1	Kontribusi subsektor perdagangan terhadap PDRB	persen	4,71	4,74	4,79	5,14	
6.2	Nilai ekspor	000 US	37.974.152	33.792.548	31.003.651	25.723.150	
6.3	Nilai Impor	000 US	7.216.737	8.143.540	9.512.101	8.471.500	
6.4	Neraca perdagangan luar negeri	000 US	30.757.415	25.649.008	21.491.550		
7	Perindustrian						
7.1	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	persen	18,67	16,89	17,15	18,45	
7.2	Kontribusi sub sektor industri pengolahan non migas terhadap PDRB	persen	5,44	5,85	6,26	6,61	
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah							
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian						
1.1	Rata-rata pengeluaran konsumsi per	Rp/Bulan	871.251	986.563	1.096.798	-	



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket
			2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	kapita						
1.2	Rata-rata pengeluaran konsumsi makanan per kapita	Rp/Bulan	403.719	450.920	508.706	-	
1.3	Rata-rata pengeluaran konsumsi non makanan per kapita	Rp/Bulan	467.532	535.643	588.003	-	
1.4	PDRB per kapita	Juta Rp	140,23	146,00	147,59	145,86	
1.5	Pendapatan regional per kapita	Juta Rp	37,28	44,62	48,30	47,52	
1.6	Jumlah Koperasi	Unit	4.507	5.394	5.258	5.319	
2	Pertanian						
2.1	Nilai tukar petani	persen	98,74	98,04	95,30	99,93	
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
1	Perhubungan						
1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan		6,8	6,2	10,05	-	
2	Penataan Ruang						
2.2	Luas wilayah produktif		-	12.987.359,34	-	-	
3	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian						
3.1	Jumlah kantor perbankan	Unit	385	448	500	-	
3.2	Jumlah akomodasi (hotel/penginapan)	Unit	393	420	537	349	
3.3	Jumlah rumah makan/ restoran	Unit	1.086	1.086	1.340	716	
4	Lingkungan Hidup						
4.1	Persentase rumah tangga dengan sumber air bersih	persen	80,01	82,18	-	-	



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket
			2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Komunikasi dan Informatika						
5.1	Daya listrik yang diproduksi	MWh	2.568.477,28	2.818.468,89	2.714.707,01	3.077.636,77	
5.2	Jumlah pelanggan listrik	titik	581.124	661.386	663.582	701.585	
Fokus Iklim Berinvestasi							
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian						
1.1	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	Juta Rp	15.638.335,2	10.046.477,4	33.096.712,7	38.469.903,4	
Fokus Sumber Daya Manusia							
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian						
1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		76,22	76,71	77,33	-	
1.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		61,29	61,84	-	--	
1.3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		61,07	61,86	62,93	53,53	
1.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		68,51	66,39	63,53	63,48	

2.2 EVALUASI KINERJA TAHUN LALU

Salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah adalah evaluasi terhadap program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan perencanaan dan mencapai target yang diinginkan. Dengan adanya evaluasi, ketidakcocokan atau kesalahan pembuatan program dan kegiatan untuk mencapai target dapat segera diantisipasi dengan berbagai perubahan sehingga arah pembangunan daerah dapat kembali ke koridor sesuai visi dan misi kepala daerah. Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program-program dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundangan.

**2.2.1. Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program Dalam RKPD Povinsi Kalimantan Timur Tahun 2014**

Berdasarkan matriks evaluasi hasil RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014, diperoleh data, seperti tabel 2.20.

Tabel 2.20
Jumlah Program, Pagu, Realisasi, Rata-rata Capaian Target dan Predikat Kinerja

Jumlah Program	Pagu (Rp. 000)	Realisasi Anggaran (Rp. 000)	Rata-rata Capaian Target (persen)		Predikat Kinerja	
			Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuanga
528	6.705.524.857	4.422.107.945	80,18	73,82	Tinggi	Sedang

Sumber : Diolah dari hasil Evaluasi Hasil renja SKPD Tahun 2014 yang disampaikan seluruh SKPD kepada Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Secara lebih rinci, hasil pelaksanaan program RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 yang dikelompokkan berdasarkan urusan wajib dan pilihan, seperti tabel 2.21.

Tabel 2.21
Hasil Pelaksanaan Program RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

No.	Bidang Urusan	Jumlah Program	Rata-rata Tingkat Capaian Target RKPD (persen)		Predikat Kinerja (persen)		SKPD Pelaksana Bidang Urusan
			Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	URUSAN WAJIB						
1.	Pendidikan	13	87,70	74,75	T	S	Disdik
2.	Kesehatan	63	68,42	59,90	S	R	Dinkes, RSUD AWS, RSKD Balikpapan, RSJD Atma Husada, RSUD Tarakan
3.	Lingkungan Hidup	16	88,19	76,35	T	T	BLH
4.	Pekerjaan Umum	11	72,16	68,72	S	S	Dinas PU
5.	Penataan Ruang	6	92,06	68,61	ST	S	Dinas PU
6.	Perencanaan Pembangunan	15	100,00	91,39	ST	ST	Bappeda
7.	Perumahan	1	43,65	49,20	SR	SR	Dinas PU
8.	Kepemudaan dan	16	94,42	85,33	ST	T	Dispora



No.	Bidang Urusan	Jumlah Program	Rata-rata Tingkat Capaian Target RKPD (persen)		Predikat Kinerja (persen)		SKPD Pelaksana Bidang Urusan
			Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Olahraga						
9.	Penanaman Modal	8	85,12	77,63	T	T	BPMPD
10.	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	4	73,47	66,99	S	S	Disperindagkop
11.	Kependudukan dan Catatan Sipil	1	95,79	74,93	ST	S	Biro Pemerintahan
12.	Ketenagakerjaan	9	89,58	80,77	T	T	Disnakertrans
13.	Ketahanan Pangan	10	97,89	90,53	ST	T	BKPP
14.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	92,54	74,45	ST	S	BPPKB
15.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	5	100,00	79,30	ST	T	BPPKB
16.	Perhubungan	11	87,71	101,40	T	ST	Dinas Perhubungan
17.	Komunikasi dan Informatika	23	97,03	85,43	ST	T	Diskominfo, KPID
18.	Pertanahan						
19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	19	86,42	70,30	T	S	Badan Kesbangpol, Satpol PP
20.	Otda, PUM, Administrasi Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	151	81,15	78,76	T	T	Setda, Dispenda, Balitbangda, Inspektorat, Bandiklat, Set DPRD, Set KORPRI, BKD, Kantor Penghubung, BPBD, BPKP2DT, BPPWK
21.		13	83,38	75,20	T	S	BPMPD
22.	Sosial	13	94,52	88,56	ST	T	Dinsos
23.	Kebudayaan	9	89,99	88,53	T	T	Disbudpar
24.	Statistik						
25.	Kearsipan	10	90,52	82,99	T	T	Badan Arsip
26.	Perpustakaan	7	101,14	86,66	ST	T	Badan Perpustakaan
JUMLAH I		443	87,20	78,20	T	T	



No.	Bidang Urusan	Jumlah Program	Rata-rata Tingkat Capaian Target RKPD (persen)		Predikat Kinerja (persen)		SKPD Pelaksana Bidang Urusan
			Kinerja	Kuangan	Kinerja	Kuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
II	URUSAN PILIHAN						
1.	Kelautan dan Perikanan	12	97,43	99,95	ST	ST	DKP
2.	Pertanian	32	86,92	72,86	ST	S	Distan TP, Disbun, Disnak
3.	Kehutanan	11	42,78	38,71	SR	SR	Dishut
4.	Energi dan Sumber Daya Mineral	11	46,10	43,10	SR	SR	Distamben
5.	Pariwisata	4	98,94	85,87	ST	T	Disbudpar
6.	Industri	9	63,16	78,03	R	T	Disperindagkop
7.	Perdagangan	4	75,00	63,93	S	R	Disperindagkop
8.	Ketransmigrasian	2	100,00	94,13	ST	ST	Disnakertrans
JUMLAH II		85	76,29	72,07	T	S	
TOTAL (I + II)		528	81,75	75,13	T	S	

Sumber : Diolah dari hasil Evaluasi Hasil renja SKPD Tahun 2014 yang disampaikan seluruh SKPD Kepada Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Keterangan:

ST = Sangat Tinggi (91persen ≤ 100persen)
T = Tinggi (76persen ≤ 90persen)
S = Sedang (66persen ≤ 75persen)
R = Rendah (51persen ≤ 65persen)
SR = Sangat Rendah (≤ 50persen)

Berdasarkan data tersebut, dapat diperoleh gambaran antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan oleh 52 SKPD (termasuk Biro-biro yang ada pada Sekretariat Daerah).
2. Tidak terdapat program khusus untuk melaksanakan urusan pertanahan dan urusan statistik. Pelaksanaan urusan tersebut dilakukan melalui kegiatan pada beberapa program tertentu.
3. Urusan perencanaan pembangunan, kelautan dan perikanan, serta urusan ketransmigrasian memperoleh predikat kinerja “sangat tinggi”, baik untuk capaian target dan anggaran.
4. Urusan perumahan, kehutanan, serta energi dan sumber daya mineral memperoleh predikat kinerja “sangat rendah”, baik untuk capaian target dan anggaran.



Rincian capaian kinerja masing-masing bidang urusan sesuai predikat kinerja berdasarkan hasil pelaksanaan RKPD provinsi Kalimantan Timur seperti tabel 2.22.

Tabel 2.22
Predikat Kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Hasil Pelaksanaan Program RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

Predikat Kinerja	Capaian Target Kinerja	Realisasi Anggaran
Sangat Tinggi	<ol style="list-style-type: none">1. Penataan Ruang2. Perencanaan Pembangunan3. Kepemudaan dan Olahraga4. Kependudukan dan Catatan Sipil5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak6. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera7. Komunikasi dan Informatika8. Sosial9. Perpustakaan10. Kelautan dan Perikanan11. Pertanian12. Pariwisata13. Ketransmigrasian	<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan Pembangunan2. Perhubungan3. Kelautan dan Perikanan4. Ketransmigrasian
Tinggi	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan2. Lingkungan Hidup3. Penanaman Modal4. Ketenagakerjaan5. Perhubungan6. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri7. Otda, PUM, Administrasi Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa9. Kebudayaan10. Kearsipan	<ol style="list-style-type: none">1. Lingkungan Hidup2. Kepemudaan dan Olahraga3. Penanaman Modal4. Ketenagakerjaan5. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera6. Komunikasi dan Informatika7. Otda, PUM, Administrasi Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian8. Sosial9. Kebudayaan10. Kearsipan11. Perpustakaan12. Pariwisata13. Industri
Sedang	<ol style="list-style-type: none">1. Kesehatan2. Pekerjaan Umum3. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah4. Perdagangan	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan2. Pekerjaan Umum3. Penataan Ruang4. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah5. Kependudukan dan Catatan Sipil6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak7. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa9. Pertanian



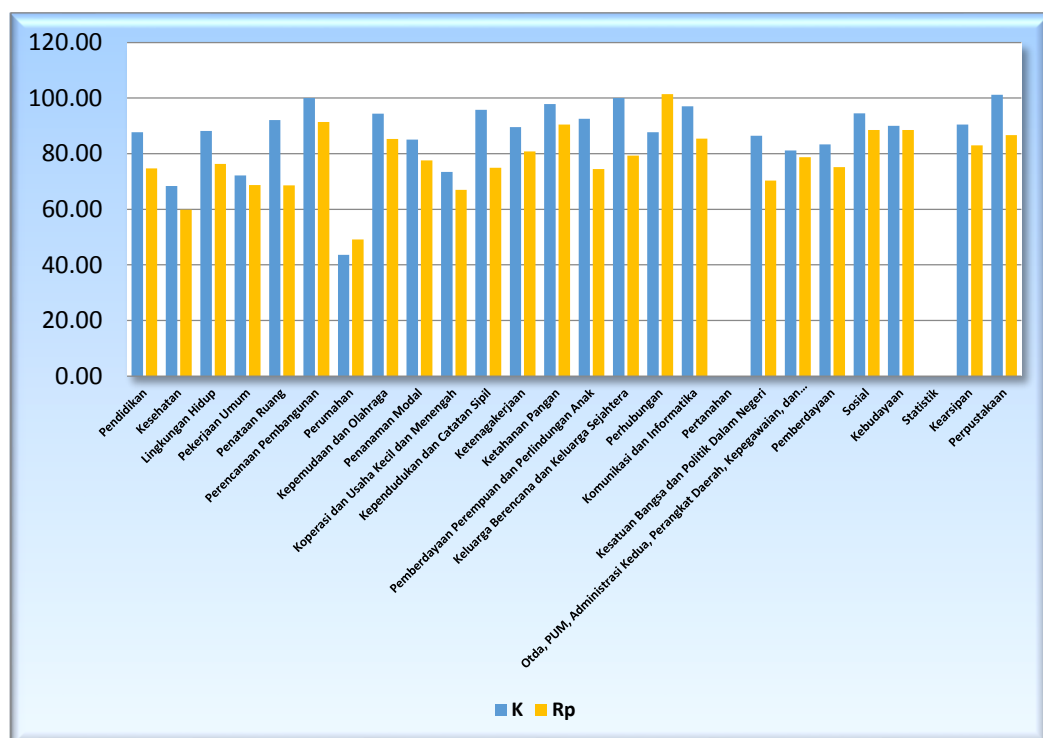
Predikat Kinerja	Capaian Target Kinerja	Realisasi Anggaran
Rendah	1. Industri	1. Kesehatan 2. Perdagangan
Sangat Rendah	1. Perumahan 2. Kehutanan 3. Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Perumahan 2. Kehutanan 3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Sumber : Diolah dari hasil Evaluasi Hasil renja SKPD Tahun 2014 yang disampaikan seluruh SKPD Kepada Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Bidang urusan yang memperoleh predikat kinerja “sangat tinggi” untuk pencapaian target kinerja adalah 13 bidang urusan, predikat “tinggi” dicapai 10 bidang urusan, predikat “sedang” diperoleh 4 bidang urusan, predikat “rendah” diperoleh 1 bidang urusan, dan predikat “sangat rendah” terdapat pada 3 bidang urusan.

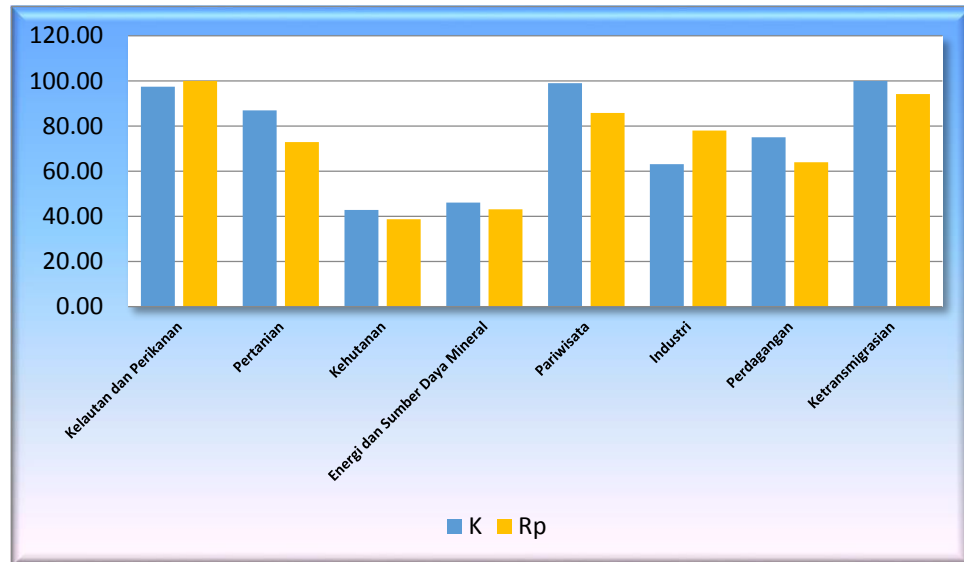
Sedangkan untuk realisasi anggaran, bidang urusan yang memperoleh predikat kinerja “sangat tinggi” adalah 4 bidang urusan, predikat “tinggi” dicapai 13 bidang urusan, predikat “sedang” diperoleh 9 bidang urusan, predikat “rendah” diperoleh 2 bidang urusan, dan predikat “sangat rendah” terdapat pada 3 bidang urusan.

Gambar. 2. 21
Tingkat Capaian Kinerja Progran RKPD (Urusan Wajib)



Sumber : Diolah dari hasil Evaluasi Hasil renja SKPD Tahun 2014 yang disampaikan seluruh SKPD Kepada Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Gambar. 2.22
Tingkat Capaian Kinerja Program RKPD (Urutan Pilihan)



Sumber : Diolah dari hasil Evaluasi Hasil renja SKPD Tahun 2014 yang disampaikan seluruh SKPD Kepada Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

2.2.2. Capaian 19 Sasaran dan 119 Program Prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018, terdapat 19 sasaran dan 119 program pembangunan yang bersifat prioritas untuk mencapai visi misi gubernur. Mengingat Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 tentang RKPD Tahun 2014 terlebih dahulu ditetapkan dari Perda Nomor 7 tentang RPJMD, maka tidak seluruh program yang bersifat prioritas tersebut dilaksanakan pada tahun 2014. Program yang belum dilaksanakan pada tahun 2014 tersebut akan mulai dilaksanakan pada tahun 2015.

Capaian target kinerja dan anggaran 119 program RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 yang bersifat prioritas yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014, diperoleh rata-rata capaian target 19 sasaran RPJMD untuk Tahun 2014 seperti tabel 2.23.



Tabel 2.23
Capaian Kinerja 119 Program Prioritas RPJMD Berdasarkan Hasil Pelaksanaan Program
RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

No. Urut	Judul Program		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian RKPD Tahun 2014 (persen)		SKPD Pelaksana Program
				Kinerja	Pagu	
1	1	Pendidikan non formal	Angka Melek Huruf	86,91	84,03	Dinas Pendidikan
2	2	Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)	APK PAUD	100,00	87,01	Dinas Pendidikan
3	3	Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB	100,00	78,03	Dinas Pendidikan
			Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB	100,00	78,03	
			Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/SMPLB	100,00	78,03	
			Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB	100,00	78,03	
4	4	Pendidikan menengah	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK/MAK	66,67	25,47	Dinas Pendidikan
			Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/MAK	66,67	25,47	
5	5	Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	134,72	97,44	Dinas Pendidikan
6	6	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi Guru (minimal S1/D4)	83,73	81,97	Dinas Pendidikan
7	7	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	rasio angka minat baca di perpustakaan (buku/tahun)	110,46	93,30	Badan Perpustakaan
8	10	Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana RS/RSJ/RSP/RSM	Angka Kesakitan (Morbiditas)	74,32	61,14	Dinas Kesehatan, RS Atma Husada, RSUD AWS, RSUD Kanujoso, RSUD Tarakan
9	11	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Angka Kesakitan (Morbiditas)	170,38	155,94	Dinas Kesehatan, RS Atma Husada
10	12	Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	51,55	55,83	Dinas Kesehatan



No. Urut	Judul Program		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian RKPD Tahun 2014 (persen)		SKPD Pelaksana Program
				Kinerja	Pagu	
11	13	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Prevalensi HIV/AIDS	100,00	61,78	Dinas Kesehatan
12	14	Standarisasi pelayanan kesehatan	Angka Kematian Bayi per 1000 KH	90,00	66,61	Dinas Kesehatan, RSUD AWS, RSUD Kanujoso, RSUD Tarakan
13	15	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (persen)	77,43	96,86	Dinas Kesehatan
14	18	Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	IPG	100,00	68,64	BPPKB
15	22	Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN)	Proporsi Penduduk dengan asupan kalori dibawah Tingkat Konsumsi Minimum	100,00	78,61	Biro Ekonomi
16	33	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja (persen)	96,70	75,30	Disnakertrans
17	34	Pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro, kecil dan menengah	Jumlah usaha kecil dan menengah (unit usaha)	75,00	67,38	Disperindagkop
18	35	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, Usaha kecil menengah	jumlah wirausaha baru (WUB)	75,00	76,69	Disperindagkop
19	36	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi unggulan (koperasi)	100,00	72,92	Disperindagkop
20	37	Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase pemuda (usia 16-30 thn) pengangguran yang berwirausaha	100,00	95,30	Dispora
21	38	Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif	Persentase Pengangguran menjadi Wirausahawan Baru	83,33	94,38	Disnakertrans
22	39	Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	84,19	71,06	Disnakertrans
23	42	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	rasio pasar per 10.000 penduduk	100,00	71,62	Disperindagkop
24	44	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi (triliun)	114,25	86,62	BPPMD
25	45	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai Persetujuan Investasi (Triliun)	88,15	90,21	BPPMD



No. Urut	Judul Program		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian RKPD Tahun 2014 (persen)		SKPD Pelaksana Program
				Kinerja	Pagu	
26	47	Pengembangan Sentra-sentra industri potensial	Jumlah Industri inti pengolahan khas daerah	100,00	59,84	Disperindagkop
27	48	Penataan Struktur Industri Hulu - Hilir	Volume Usaha kawasan industri (Triliun)	100,00	90,45	Disperindagkop
28	49	Perluasan Kebun Sawit	Luas Kebun Sawit (juta Ha)	71,84	91,08	Dinas Perkebunan
29	51	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah usaha pengolahan hasil (unit)	103,57	98,50	Dinas Peternakan
30	53	Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Jumlah UKM yang mendapatkan transaksi bisnis	100,00	97,76	Disperindagkop
31	54	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Produk Olahan non migas dan non batubara (Juta US\$)	75,00	73,51	Disperindagkop
32	55	Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Derawan	Jumlah kunjungan wisatawan derawan dan sekitarnya (orang)	110,68	59,98	Disbudpar
33	56	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah wisatawan (juta orang)	92,99	92,99	Disbudpar
34	57	Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit	Luas Areal Komoditas unggulan perkebunan (4 komoditas) (Ha)	92,96	81,45	Dinas Perkebunan
35	58	Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan	Jumlah Kawasan Peternakan	100,00	97,12	Dinas Peternakan
36	59	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Nilai Ekspor Perikanan (juta USD)	144,70	93,83	Dinas Perikanan
37	61	Peningkatan Produksi pertanian	jumlah produksi padi (GKG) (ton)	98,46	87,42	Dinas Pertanian
38	62	Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan	Produktivitas Unggulan Pertanian/Padi (ton/Ha)	110,71	82,07	Dinas Pertanian
39	63	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah Penyuluh Pertanian Berkualitas	100,00	94,73	BKPP
40	65	Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluh	Jumlah BPP	100,00	94,00	BKPP
41	66	Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi	100,00	92,16	Disnakertrans
42	67	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Luas lahan pertanian yang terlayani (ha)	98,86	80,52	Dinas PU



No. Urut	Judul Program		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian RKPD Tahun 2014 (persen)		SKPD Pelaksana Program
				Kinerja	Pagu	
43	68	Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan Pangan Daerah (persen)	100,00	77,89	BKPP
44	69	Peningkatan produksi Hasil Peternakan	jumlah produksi daging (ton)	88,68	92,00	Dinas Peternakan
45	70	Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	62,43	86,06	Dinas kelautan dan perikanan
46	71	pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	99,48	73,50	Dinas kelautan dan perikanan
47	73	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	107,45	91,62	Dinas Pertanian
48	75	Peningkatan penerapan teknologi peternakan	Jumlah Instalasi Biogas (unit)	88,79	93,47	Dinas Peternakan
49	78	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Penyediaan Jalan dengan Kapasitas Daya Mampu diatas 10 Ton (persen)	60,24	0,00	Dinas PU
50	79	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tingkat Kemantapan jalan (persen)	99,99	80,19	Dinas PU
51	81	Pembangunan jalan tol	Ketersediaan jalan tol (persen)	33,03	25,27	Dinas PU
52	84	Pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi darat, sungai, danau dan peyebrangan	Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi darat, sungai, danau dan peyebrangan	92,86	92,86	Dinas Perhubungan
53	86	Sarana dan prasarana telekomunikasi	Ibukota kecamatan yang terlayani jaringan telekomunikasi (persen)	100,00	64,42	Diskominfo
54	87	Penyediaan dan pengelolaan air baku	Kapasitas air baku (lt/detik)	100,00	61,74	Dinas PU
55	88	Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.	Cakupan Layanan Air Minum (persen)	70,71	62,84	Dinas PU
56	90	Pengendalian banjir	Luas genangan banjir (Ha)	100,00	67,43	Dinas PU
57	97	Peningkatan pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	92,50	85,27	Biro Organisasi
58	98	Pembinaan dan pengembangan aparatur	Tertatanya pembinaan PNS serta peningkatan kualitas SD aparatur (persen)	92,57	83,45	BKD
59	100	Pengembangan data statistik dan spasial	Tingkat ketersediaan data & informasi perencanaan pembangunan	100,00	91,88	Bappeda
60	101	Peningkatan kualitas manajemen berbasis	Predikat akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi	86,67	88,44	Biro Organisasi



No. Urut	Judul Program		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian RKPD Tahun 2014 (persen)		SKPD Pelaksana Program
				Kinerja	Pagu	
		kinerja				
61	102	Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah	Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100,00	100,00	Biro Pemerintahan
62	103	Pendidikan politik masyarakat	Indeks demokrasi	92,00	76,38	Kesbangpol
63	105	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas rehabilitasi hutan dan lahan (ha)	89,62	89,62	Dinas Kehutanan
64	107	Rehabilitasi Hutan Mangrove	Luas penanaman mangrove (ha)	79,16	79,16	Dinas Kehutanan
65	112	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	98,08	90,24	BLH
66	113	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat adipura	100,00	89,38	BLH
67	116	Pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup	Perda/Pergub	100,00	81,93	BLH

Sumber : Diolah dari hasil Evaluasi Hasil renja SKPD Tahun 2014 yang disampaikan seluruh SKPD Kepada Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Program yang bersifat prioritas yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 berjumlah 67 program, dengan demikian terdapat 52 program yang belum dilaksanakan.

Disamping itu, dari 67 program yang bersifat prioritas yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 tersebut, 39 program diantaranya memiliki target yang ingin dicapai pada tahun 2014 (selisih antara kondisi tahun 2013 dan kondisi yang diharapkan pada tahun 2014) seperti tabel 2.24.



Tabel 2.24
Kondisi Indikator Program Prioritas RPJMD Tahun 2013 dan
Target Yang Akan Dicapai Pada Tahun 2014

	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014	Selisih Target Kinerja (Gap)
1	Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)	APK PAUD	49,77	55,00	5,23
2	Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB	97,68	97,78	0,10
3	Pendidikan menengah	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK/MAK	76,49	76,53	0,04
4	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi Guru (minimal S1/D4)	51,99	53,00	1,01
5	Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	IPG	61,07	61,85	0,78
6	Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesehatan	proporsi penduduk miskin yang memiliki akses pelayanan kesehatan (persen)	40,00	65,00	25,00
7	Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN)	Proporsi Penduduk dengan asupan kalori dibawah Tingkat Konsumsi Minimum	6,03	100	93,97
8	Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan	persentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif	7,00	9,40	2,40
9	Pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro, kecil dan menengah	Jumlah usaha kecil dan menengah (unit usaha)	50	60	10
10	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, UKM	Jumlah wirausaha baru (WUB)	500	1.000	1.000
11	Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase pemuda (usia 16-30 thn) pengangguran yang berwirausaha	0	0,02	0,02
12	Pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	73,06	95,00	21,94
13	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi (triliun)	20,88	32,49	32,49
14	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai Persetujuan Investasi (Triliun)	34,11	34,11	34,11
15	Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perijinan	Rata-rata Hari Proses Perijinan Investasi (hari)	7	5	-2
16	Perluasan Kebun Sawit	Luas Kebun Sawit (juta Ha)	1,02	1,12	0,10
17	Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Jumlah UKM yang mendapatkan transaksi bisnis	2	3	3



	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014	Selisih Target Kinerja (Gap)
18	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Produk Olahan non migas dan non batubara (Juta US\$)	5	5	5
19	Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Derawan	Jumlah kunjungan wisatawan derawan dan sekitarnya (orang)	61.195	65.000	65.000
20	Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit	Luas Areal Komoditas unggulan perkebunan (4 komoditas) (Ha)	119.664	139.656	19.992
21	Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan	Jumlah Kawasan Peternakan	0	5	5
22	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Nilai Ekspor Perikanan (juta USD)	15,00	15,00	15,00
23	Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan	Produktivitas Unggulan Pertanian/Padi (ton/Ha)	4,06	4,30	0,24
24	Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Berkualitas	Jumlah PPL Perikanan Berkualitas	67	78	11,00
25	Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluh	Jumlah BPP	95	100	5
26	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Luas lahan pertanian yang terlayani (ha)	3.850	4.350	500
27	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	95,93	96,30	0,37
28	Diversifikasi Energi	persen Bauran Energi Baru Terbarukan	0,02	0,50	0,48
29	Pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi darat, sungai, danau dan peyebrangan	Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi darat, sungai, danau dan peyebrangan	15	13	-2
30	Penyediaan dan pengelolaan air baku	Kapasitas air baku (lt/detik)	170	260	90,00
31	Pengembangan zona integritas	jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK-WBBM	0	1	1
32	Peningkatan pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	68	70	2
33	Pembinaan dan pengembangan aparatur	Tertatanya pembinaan PNS serta peningkatan kualitas SD aparatur (persen)	92,00	95,00	3,00
34	Pengembangan data statistik dan spasial	Tingkat ketersediaan data & informasi perencanaan pembangunan	82	86	4



Program Prioritas		Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014	Selisih Target Kinerja (Gap)
35	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Skor penyelenggaraan tata ruang	64,83	67,83	3,00
36	Rehabilitasi Hutan Mangrove	Luas penanaman mangrove (ha)	45	45	45
37	Pelestarian kawasan-kawasan bernilai ekosistem tinggi	Jumlah HCV dikawasan hutan	0	2	2
38	Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan	Jumlah Emisi yang diturunkan (CO ₂ E)	187,50	218,75	31,25
39	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	74,04	78,29	4,25

Sumber : Diolah dari hasil Evaluasi Hasil renja SKPD Tahun 2014 yang disampaikan seluruh SKPD Kepada Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Selisih target tersebut merupakan beban kerja SKPD pelaksana program dan diupayakan dicapai pada tahun 2014. Berdasarkan capaian kinerja 67 program prioritas tersebut di atas, maka dapat diestimasikan pencapaian 19 sasaran RPJMD pada tahun 2014, seperti tabel 2.25.



Table 2.25
Tujuan, Sasaran dan target kinerja impact terhadap Realisasi Kinerja SKPD Terkait

Tujuan	Sasaran		Indikator (Impact)	Kondisi 2013	Kinerja Impact Tahun 2014				SKPD
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (persen)		
Misi I: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi									
1. Meningkatkan kualitas SDM Kaltim	1	Meningkatnya IPM	IPM	76.71	77.01	77,33 (tahun 2013)	100.4	Belum tercapai	Dinas Pendidikan
	2	Meningkatnya angka melek huruf	Angka melek huruf	98.30	98.40	98.30	99.8	Belum tercapai	Dinas Pendidikan
	3	Meningkatnya rata-rata lama sekolah	Angka rata-rata lama sekolah	9.60	10.00	9.60	96	Belum tercapai	Dinas Pendidikan
	4	Meningkatnya angka harapan hidup	Angka harapan hidup	71.40	71.50	71.78 (tahun 2013)	103.7	Tercapai	Dinas Kesehatan
	5	Meningkatnya pendapatan per kapita	Pendapatan per kapita	44.65	46.65	47.52	100	Tercapai	Disnakertrans, BPPKB
Misi II:Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan									
2. Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat	6	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan	6.06	6.00	6.42	93.45	Belum tercapai	Biro Sosial, Disdik, Diskes, Dinas Sosial, Biro Ekonomi, BPMPD, Dishut, Disnakertrans, Distan,Distanak, BPPKB, BPBD, Dinas PU



Tujuan	Sasaran		Indikator (Impact)	Kondisi 2013	Kinerja Impact Tahun 2014				SKPD
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (persen)		
	7	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran	8.90	8.00	7.53	106	Tercapai	Disnakertrans,Disperinda gkop, Dispora, Dinas Sosial
	8	Meningkatnya daya beli masyarakat	Tingkat inflasi	9.65	6±1	7.66	100	Tercapai	BI, Disperindagkop, Bappeda
			Paritas daya beli (<i>purchasing power parity</i>)	649.850	698.622	653.700 (status 2013, perhitungan menggunakan data IPM -> IPM publish lagging 1 Thn)	93.4	Belum tercapai	Biro Ekonomi
	9	Menurunnya Indeks Gini	Indeks Gini	0.36	0.35	0,3341	106	Tercapai	
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau	10	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	1.59	2.3-3.2	2.85	100	Tercapai	BPPMD, Disperindagkop
			Pertumbuhan ekonomi non migas	5.17	5.5-6.3	5.86	100	Tercapai	Disperindagkop, Disbun, Distanak, Disbudpar
	11	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas	Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas	6.50	6.30	7.21	115.3	Tercapai	Distan, DISBUN, Disnak, DKP, Disperindagkop



Tujuan	Sasaran		Indikator (Impact)	Kondisi 2013	Kinerja Impact Tahun 2014				SKPD
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (persen)		
	12	Tercapainya swasembada beras	Rasio pemenuhan beras	72.00	73.00	67.46	101	Tercapai	Distan, BKPP, Disnakertrans, Distanak, Dinas PU
	13	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan	Bauran energi baru terbarukan	0.02	0.62	0.5	80.6	Belum tercapai	Distamben , PLN, Disnak, Swasta
Misi III:Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata									
4. Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	14	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar	Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	5.00	5.50	5.90	107.2	Tercapai	Dinas PU, Dishub, Diskominfo
Misi IV:Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik									
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	15	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Indeks persepsi korupsi	5.20	5.20	4.90	94.2	Belum tercapai	Inspektorat, Biro Organisasi dan Bappeda
			Opini BPK	WTP	WTP	WDP	-	Belum tercapai	Biro Keuangan
	16	Terwujudnya Peningkatan kualitas	Indeks kepuasan masyarakat	68.00 (Baik)	70.00 (Baik)	72.16 (Baik)	100	Tercapai	Biro Organisasi



Tujuan	Sasaran		Indikator (Impact)	Kondisi 2013	Kinerja Impact Tahun 2014				SKPD
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (persen)		
		pelayanan publik							
	17	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	70.75 (B+)	72.00 (B+)	70.97 (B+)	98.5	Belum tercapai	Biro Organisasi
			Kinerja Pemerintahan Daerah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	100	Tercapai	Biro Pemerintahan
Misi V:Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim									
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	18	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan	Indeks kualitas lingkungan	74.07	78.29	75.24	96.1	Belum tercapai	BLH, Dishut, Dinas PU, Distamben, Disbun,
	19	Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	Intensitas emisi	1.500	1.498	1.611	92.9	Belum tercapai	BLH, Dishut, Disbun, Distamben, Bappeda.

Sumber : Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Timur



2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Disamping capaian target kinerja dan serapan anggaran, hal lain yang dievaluasi dalam pelaksanaan RKPD adalah indentifikasi terhadap faktor pendorong yang menyebabkan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan maupun faktor-faktor yang menghambat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan.

Faktor pendorong dan faktor penghambat diisi oleh setiap SKPD pada baris yang telah disediakan pada format evaluasi hasil Renja SKPD. Baris faktor pendorong diisi dengan uraian penjelasan ringkas terhadap faktor-faktor dominan yang mendorong tercapainya suatu target. Sedangkan baris faktor penghambat diisi dengan uraian penjelasan ringkas terhadap faktor-faktor dominan yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.

Identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat bermanfaat bagi keberhasilan pencapaian kinerja dan daya serap anggaran antara lain karena :

1. Lebih dini diketahui hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target di akhir tahun anggaran sehingga dapat diambil langkah-langkah untuk perbaikan dan penyempurnaan.
2. Serapan anggaran dapat dioptimalkan untuk menjadikan APBD sebagai penggerak perekonomian daerah yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
3. Mempermudah pengkajian dan analisa tingkat capaian dan daya serap sehingga meningkatkan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan efisiensi anggaran.
4. Perencanaan tahap berikutnya memiliki data dan informasi yang akurat, sehingga perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan dengan baik, efektif, dan efisien.

2.3.1. Kebijakan Pelaksanaan RKPD Masa Yang Akan Datang

Berdasarkan informasi yang disampaikan SKPD sebagaimana diuraikan di atas, maka diperoleh kesimpulan terkait dengan faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan RKPD, faktor penghambat pelaksanaan RKPD, dan tindak lanjut yang diperlukan untuk RKPD Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:
 - a. Kualitas SDM yang memadai, memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal.
 - b. Ketersediaan anggaran yang memadai.
 - c. Sarana dan prasarana kantor yang baik dan didukung dengan teknologi dan informasi yang memadai dan mendukung kinerja di lapangan.



- d. Komitmen pimpinan daerah terhadap program kesehatan.
 - e. Program dan kegiatan yang relevan dan terintegrasinya sehingga memudahkan dalam pencapaian sasaran program/Kegiatan tersebut.
 - f. Jadwal pelaksanaan kegiatan tersusun dengan baik, menjadi pedoman dalam pelaksanaan setiap bulan.
 - g. Koordinasi SKPD yang baik.
 - h. Anggaran yang disahkan diawal tahun sehingga waktu pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih cepat.
 - i. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP).
2. Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja:
- a. Kualifikasi dan kuantitas SDM yang belum memadai.
 - b. Persepsi Stake holder yang kurang tepat terhadap konsep pembangunan di bidang urusan kesehatan.
 - c. Belum terstandarisasinya pelaksanaan kegiatan (misalnya ISO 9001 : 2008).
 - d. Kerjasama lintas program yang belum tercapai.
 - e. Peraturan yang membatasi kewenangan daerah, jadwal kegiatan menyesuaikan pusat dan pembayaran termin ke pihak ketiga dan perubahan anggaran.
 - f. Masih rendahnya produktivitas beberapa komoditas perkebunan bila dibandingkan dengan potensi produksinya dan adanya moratorium perizinan untuk pembangunan usaha perkebunan serta alokasi dana pembangunan infrastruktur pertanian yang tidak tersedia/ anggarannya terlalu kecil.
 - g. Keluaran kegiatan yang pelaksanaannya oleh pihak ke-3, pada umumnya terealisasi keuangannya pada Triwulan III s/d IV.
 - h. Terlambatnya pengesahan anggaran SKPD dan revisi anggaran.
 - i. Masalah sosial budaya yang menghambat pelaksanaan program/kegiatan (seperti pembebasan tanah, dll).
 - j. Kurang tersedianya alokasi dana untuk pembangunan secara maksimal.
 - k. Validasi data yang berhubungan dengan kegiatan di Kab/Kota masih berjalan kurang optimal.
 - l. Belum adanya komitmen yang kuat bagi pelaksana kegiatan terutama yang ada di Bidang Teknis untuk melaksanakan kegiatan berorientasi hasil berdasarkan target



kinerja yang telah ditetapkan, dan tidak berpedoman pada schedule yang telah dibuat.

3. Tindak Lanjut:

- Penyelesaian sisa pekerjaan akan di usulkan pada TA 2016 dan diharapkan dapat terealisasi pada Tahun tersebut.
- Dilakukan Evaluasi Renja dan Renstra sesuai ketentuan.
- Mengevaluasi program dan kegiatan yang capaian kerjanya rendah.
- Target kinerja Renstra / Renja harus bersifat terukur secara kuantitatif, sehingga prosentase capaian kinerja dapat dihitung/ditetapkan.

2.3.2. Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan data, informasi, dan gambaran umum capaian kinerja pembangunan; identifikasi isu-isu penting dan masalah urgent dari tingkat nasional yang ada keterkaitannya dengan daerah; serta identifikasi isu-isu penting dan masalah urgent yang terjadi pada daerah, maka dapat digambarkan bahwa permasalahan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014 seperti tabel 2.26.

Tabel 2.26
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

No.	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun Berkenaan	Permasalahan & Isu Strategis	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum meratanya prasarana dan sarana dan akses pendidikan bagi masyarakat - Masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum menikmati pelayanan pendidikan. - Relevansi pendidikan belum memenuhi kebutuhan standar lapangan kerja. - Tenaga pendidik dan kependidikan belum memenuhi kualifikasi - Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan USB dan RKB - Pemberian beasiswa bagi masyarakat kurang mampu - Pengembangan sekolah kejuruan - Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan - Peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat yang belum terjangkau pendidikan 9 tahun - Pembangunan sekolah terpadu -



No.	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun Berkenaan	Permasalahan & Isu Strategis	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Peningkatan Kualitas pelayanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masih belum optimal. - Perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana medis - Terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga medis - Masih tingginya angka kematian bayi, kematian balita, kematian Ibu melahirkan, kekurangan gizi dan kesakitan penyakit menular. - Terbatasnya tenaga kesehatan dikawasan perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> - - Peningkatan prasarana dan sarana pendukung pelayanan kesehatan - Penambahan dan pemerataan jumlah tenaga medis - Peningkatan kualitas paramedis - Jaminan Pelayanan Kesehatan - Pembangunan sekolah terpadu -
3.	Percepatan Pengentasan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian jaminan pelayanan dasar dan perlindungan sosial bagi kelompok miskin belum optimal dan belum tepat sasaran. - Partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum optimal - Kemitraan BUMN/BUMD/ Investasi swasta dalam pemberdayaan UMKM belum maksimal - Belum terintegrasinya program dan kegiatan sektoral untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan - Belum terpenuhinya pembangunan infrastruktur dasar masyarakat miskin - Masih terdapat penyaluran Raskin yang kurang tepat sasaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi upaya penanggulangan kemiskinan klaster 1, klaster 2, klaster 3, dan klaster 4 - Integrasi program/ kegiatan antar sektor - Kemitraan CSR untuk pemberdayaan UMKM - Ketersediaan dokumen masyarakat miskin



No.	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun Berkenaan	Permasalahan & Isu Strategis	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Peningkatan dan Perluasan kesempatan kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Kompetensi pencari kerja belum memenuhi kebutuhan pasar kerja - Kompetensi pencari kerja belum memenuhi kebutuhan standar kualifikasi lapangan kerja - Laju peningkatan pencari kerja yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja. - Tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) - Perempuan masih belum memiliki peluang besar bekerja di sektor non pertanian (industri, pertambangan, dll) - Sektor ekonomi yang berkembang belum memberikan kesempatan kerja yang luas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan investasi - Peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja - Peningkatan usaha pertanian dalam arti luas dan sektor padat karya lainnya. - Pengarusutamaan gender - Pendidikan kewirausahaan - Peningkatan hubungan industrial (perlindungan tenaga kerja dan penyelesaian kasus PHK)
5.	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kualitas dan kuantitas produk UMKM - Rendahnya system pemasaran produk UMKM daerah - Minimnya pendampingan dan pembinaan UMKM - Keterbatasan fasilitas Pendukung dalam berwirausaha - Belum berkembangnya wirausahawan mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> - Daya saing produk - Ketersediaan modal usaha - Sarana pemasaran - Promosi produk - Peningkatan /fasilitasi pelatihan wirausahawan
6.	Percepatan Transformasi Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya tingkat capaian rencana investasi dibandingkan dengan realisasi investasi - Belum disosialisasikannya RTRW Provinsi dan beberapa RTRW Kabupaten/Kota secara menyeluruh - Kompetensi tenaga kerja belum 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan perda/ pergub penanaman modal daerah - Peningkatan kualifikasi PTSP - Persetujuan substansi perubahan kawasan dari menteri kehutanan - Penetapan perda RTRW provinsi dan kabupaten/kota



No.	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun Berkenaan	Permasalahan & Isu Strategis	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>memenuhi kebutuhan pasar kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya Infrastruktur pendukung kawasan pusat pertumbuhan - Belum memadainya kualitas infrastruktur destinasi pariwisata, promosi paket wisata dan jasa pendukung pariwisata - Lamanya pelayanan proses perizinan 	<p>sebagai acuan investasi dan pelaksanaan pembangunan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualifikasi pendidikan sesuai kebutuhan pasar kerja - Pengembangan infrastruktur yang berkualitas tinggi - Ketersediaan pariwisata, paket wisata dan jasa pendukung pariwisata
7.	Pengembangan Agribisnis	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kecilnya skala usaha tani yg diusahakan - Langkahnya permodalan untuk membiayai usaha tani - Kurangnya perhatian bagi pelaku usaha tani - Belum berkembangnya pemasaran hasil pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya ketersediaan lembaga permodalan/Fasilitas Kredit - Perlunya ketersediaan kredit teknologi - pengembangan industrialisasi pertanian
8.	Peningkatan Produksi Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih adanya alih fungsi lahan pertanian - Masih perlunya peningkatan produktivitas pertanian - Kurangnya intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian - Kurangnya sarana dan prasarana dan system irigasi pertanian - Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pertanian - Ketersediaan benih dan pupuk yang kurang - Belum berkembangnya hilirisasi produk pertanian - Akses pendistribusian produk pertanian belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan - Intensifikasi - Ekstensifikasi - Pembangunan dan optimalisasi jaringan irigasi - Revitalisasi penyuluhan pertanian -



No.	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun Berkenaan	Permasalahan & Isu Strategis	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Pemenuhan kebutuhan Energi Ramah Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Diversifikasi bahan Bakar - Daya mampu PLN yang belum memenuhi kebutuhan listrik - jaringan transmisi listrik yang belum mencukupi - pengembangan energi baru dan terbarukan belum berjalan secara optimal - keterbatasan akses terhadap sumber energi - ekspor batubara tidak bisa dikontrol 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan pembangkit listrik yang ramah lingkungan - ketersediaan bahan bakar gas - intensif bagi pengembangan penggunaan energi baru terbarukan
10.	Peningkatan Infrastruktur Infrastruktur Dasar	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tercapainya kondisi jalan provinsi yang mampu mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi - Fasilitas sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, dan udara) belum representatif dalam mendukung secara penuh kegiatan ekonomi masyarakat - Fasilitas sarana dan prasarana pengendalian banjir belum berfungsi secara optimal dan maksimal - Belum terpenuhinya kebutuhan air baku, air bersih dan sanitasi yang layak - Terhambatnya aktivitas ekonomi yang disebabkan tidak tersedia akses jalan dan jembatan - Belum tersedianya transportasi jalan dan jembatan yang memadai di kawasan perbatasan - Belum tersedianya bandara di 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepastian status jalan - Tersedianya dokumen teknis perencanaan - Ketersediaan lahan - Ketersediaan bahan baku - Ketersediaan bahan baku dan peralatan - Tersedianya dokumen teknis perencanaan - Pembangunan tower di 3 kabupaten perbatasan -



No.	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun Berkenaan	Permasalahan & Isu Strategis	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>kawasan perbatasan yang representatif dalam mengoptimalkan pelayanan transportasi udara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedianya dermaga yang representatif dalam rangka mengoptimalkan pelayanan transportasi sungai dan danau - Belum tersedianya transportasi jalan dan jembatan yang memadai di kawasan perbatasan - Belum tersedianya bandara di kawasan perbatasan yang representatif dalam mengoptimalkan pelayanan transportasi udara - Belum tersedianya dermaga yang representatif dalam rangka mengoptimalkan pelayanan transportasi sungai dan danau 	
11.	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kualitas pelayanan publik - Masih rendahnya kesadaran dalam memberikan pelayanan publik yang optimal - Rendahnya kualitas SDM aparatur - Belum optimalnya penataan sumberdaya aparatur sesuai standar kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> - Rekrutment sesuai kompetensi yang diperlukan - Distribusi sesuai dengan kompetensi - Diklat teknis dan fungsional - Peningkatan kualitas pelayanan publik
12.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya mutu lingkungan, akibat alih fungsi lahan - Meningkatnya kerusakan/pencemaran lingkungan perairan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian perizinan pembukaan lahan - Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan - Rehabilitasi hutan mangrove



No.	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun Berkenaan	Permasalahan & Isu Strategis	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)
		<ul style="list-style-type: none">- Kerusakan Hutan Mangrove- Kurangnya penegakan hukum lingkungan- Perencanaan belum berbasis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim- Belum diurusutamakannya isu green growth dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	<p>dan lahan kritis</p> <ul style="list-style-type: none">- Penegakan hukum yang belum adil- Implementasi RAD GRK dan pengembangan kelembagaan perubahan iklim dan pengarus utama green growth

Sumber : Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Timur